



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN

2025 - 2029



KABUPATEN KUTAI BARAT
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman strategis bagi Dinas Perikanan dalam menyusun arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mempertimbangkan dinamika isu strategis yang berkembang, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) setiap tahunnya, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.

Akhirnya, kami berharap Renstra ini dapat dijadikan acuan yang bermanfaat bagi semua pihak, serta menjadi dokumen yang hidup dan adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan pembangunan di masa mendatang.

Kutai Barat, 18 Sep... 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat



PILIP, S.T., M.Si
NIP. 19691124 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Landasan Hukum.....	10
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	13
1.4. Sistematika Penyusunan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan.....	16
2.2. Sumberdaya Dinas Perikanan	43
2.2.1. Sumber Daya Aparatur.....	43
2.2.2. Asset dan Unit Usaha.....	44
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.3.1. Hasil Pelaksanaan Renstra Perikanan Tahun 2021-2024.....	51
2.3.2. Kelompok Layanan sasaran.....	54
2.4. Permasalahan Dan Isu Strategis Pelayanan Dinas Perikanan	56
2.4.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
2.4.2. Isu Strategis Pelayanan Dinas Perikanan.....	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN	70
3.1. Tujuan dan Sasaran	70
3.1.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provisi/Kabupaten Tahun 2025- 2029	70
3.1.2. Sasaran Renstra pada Provinsi/Kabupaten Tahun 2025-2029.....	72
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kutai Barat	73
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan.....	80

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN URUSAN PERIKANAN	88
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan 2025–2030....	88
4.2. Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Tahun 2025–2029	105
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	133
BAB V PENUTUP	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025	43
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2025	43
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025	44
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	44
Tabel 2. 5 Sarana Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat	44
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2025	47
Tabel 2. 7 Penilaian SAKIP Tahun 2023 - 2024	48
Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat ...	59
Tabel 2. 9 Isu Strategis Perangkat Dinas Perikanan Kutai Barat	63
Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dengan Dukungan dan Fokus Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat 2025–2029	77
Tabel 3. 2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kutai Barat	79
Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat	83
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kutai Barat 2025-2029	85
Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Dinas Perikanan, Kabupaten Kutai barat	90
Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat	107
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai barat	130
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat ..	134
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas Perikanan Kutai Barat	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.	9
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Dimana didalamnya memuat tentang tatacara perubahan pada dokumen perencanaan pada tingkat kementrian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat Kabupaten. Dimana didalamnya diatur mengenai perubahan RPJMD pada tingkat pemerintahan daerah yang mengakibatkan perubahan pada Renstra pada setiap OPD.

Terjadinya perubahan RPJMD yang berimbas pada perubahan Renstra OPD disebabkan oleh disahkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Undang Undang tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Perubahan kewenangan ini kemudian berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan tersebut.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD yang merupakan revisi dari dokumen renstra awal untuk periode 5 tahun kedepan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan (Renstra Diskan) tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang

diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan perikanan selama kurun waktu tahun 2025 -2029 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah mengalami perubahan Renstra PD berkedudukan dan berfungsi sebagai:

1. Acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) pada setiap tahun anggaran; dan
2. Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Renstra PD disusun melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: (a). Persiapan, (b) Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD, (c). Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah (d) Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD, dan (e) Penetapan Renstra PD.

Renstra mempunyai arti penting bagi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat yang merencanakan pembangunan sektor perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Adapun proses penyusunan Renstra melalui tahapan penting yang harus dilakukan oleh stakeholders penyusunan Renstra. Pertama tahap persiapan penyusunan Renstra yang dimulai dengan pembentukan tim penyusun Renstra oleh kepala OPD sesuai mandat yang diberikan oleh kepala daerah. Kedua penyusunan dokumen rancangan awal (ranwal) renstra yang mengacu pada rancangan awal RPJMD Kepala Daerah terpilih sebagai draft awal untuk bahan dasar yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Ketiga penyusunan rancangan Renstra dengan mengacu kepada rancangan RPJMD Kepala Daerah dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah. Keempat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan. Kelima penyusunan rancangan akhir (Ranhir) Renstra yang mengacu kepada ranhir RPJMD dengan melibatkan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Penyusunan Renstra juga tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sehingga dapat tercipta sinergitas dan keselarasan program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan disajikan pada Gambar 1.1.



Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017

Keterkaitan Renstra ini dengan RPJMD dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan dalam rangka mengoptimalkan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJMD Kepala Daerah dalam sektor perikanan. Peran dan fungsi RPJMD sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi acuan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan bagi seluruh stakeholder termasuk swasta dan masyarakat. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat terkait dengan pencapaian misi dari RPJMD

Kabupaten Kutai Barat yaitu meningkatkan pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan secara terpadu. Indikator tujuan RPJMD dari misi ini adalah LPE kategori Pertanian, Kahutanan dan Perikanan. Dinas perikanan mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat juga menjadi pedoman penyusunan Renja tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2025 - 2029.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dasar hukum penyusunan Renstra ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 500 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5687);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Khusus Kecamatan);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur: (9-313/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Urusan Pemerintah Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029.
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dimaksudkan untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dan terukur bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di sektor Perikanan. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat adalah:

1. Memberikan arahan/pedoman yang jelas dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat pada setiap tahun anggaran;
2. Mensinkronkan seluruh rencana pembangunan, khususnya di bidang perikanan di Kabupaten Kutai Barat;
3. Mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat.
4. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tahapan penyusunan dimulai dengan analisis kondisi saat ini baik kondisi eksternal dan internal Dinas Perikanan sehingga diperoleh faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada keberadaan Dinas Perikanan. Dari analisis internal dan eksternal serta pencermatan terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan maka dirumuskanlah visi dan misi Dinas Perikanan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dalam lima bab utama yang saling terintegrasi dan mendukung proses perencanaan pembangunan sektoral di bidang perikanan. Masing-masing bab memuat substansi strategis dan teknokratik yang menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode lima tahun.

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra, yang berkaitan dengan dinamika perubahan regulasi, kebijakan nasional, serta kebutuhan penyesuaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat. Di dalam bab ini juga dipaparkan dasar hukum penyusunan yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, dibahas pula

keterkaitan antara dokumen Renstra dengan RPJPD, RPJMD, Renja, RTRW, dan dokumen sektoral lainnya untuk menjamin sinergitas perencanaan. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra dijelaskan sebagai pedoman strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam kurun waktu lima tahun, yang kemudian diakhiri dengan uraian mengenai sistematika penulisan dokumen secara menyeluruh.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat uraian mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; kondisi sumber daya; capaian kinerja pelayanan; kelompok sasaran layanan; permasalahan dan isu strategis yang dihadapi; serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan untuk mendukung pembangunan daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Renstra yang diturunkan dari NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2025–2029, dilengkapi dengan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Perikanan.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERIKANAN

Bab ini memuat cascading tujuan dan sasaran ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai nomenklatur yang ditetapkan pemerintah. Juga mencakup indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta kebutuhan pendanaan untuk periode 2025–2030.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi penegasan bahwa Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan selama periode perencanaan, sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas, koordinasi, dan sinergi pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Dinas Perikanan memiliki **tugas pokok** melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan, termasuk fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan program sektor perikanan.

Adapun **fungsi utama** Dinas Perikanan meliputi:

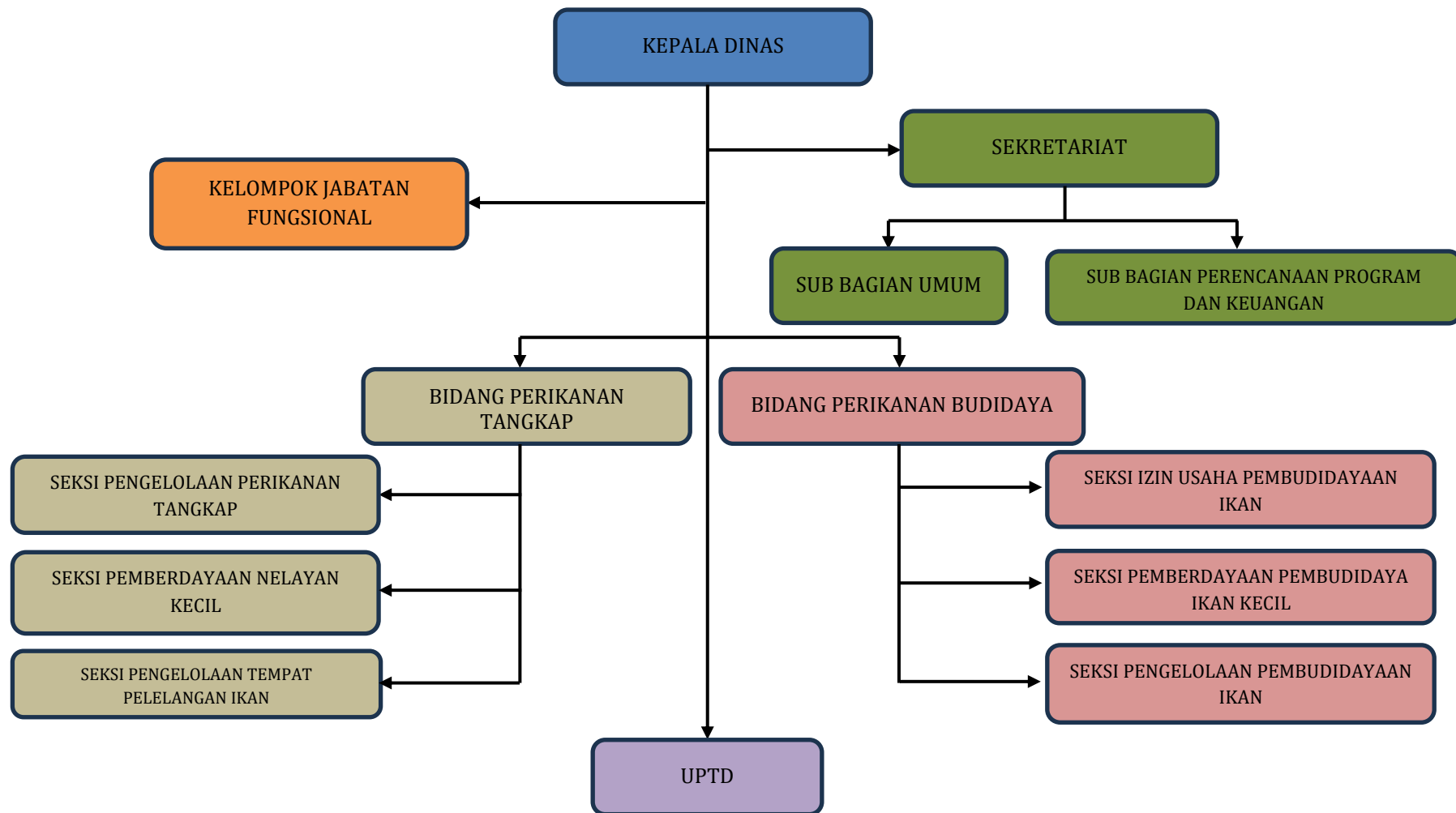
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, dan konservasi sumber daya ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya;
3. Pelaksanaan pengawasan dan konservasi sumber daya ikan serta lingkungannya;
4. Pemberdayaan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan;
5. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan di bidang perikanan yang selaras dengan RPJMD;
6. Pelaksanaan fungsi administrasi, pembinaan, serta pengendalian internal perangkat daerah.
7. Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan dan pengembangan subsektor perikanan agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat. Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan pilihan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya
4. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat

Rincian tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam struktu organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat adalah:

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai **tugas** merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kepala mempunyai **rincian tugas** sebagai berikut:

- 1) mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas Perikanan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- 2) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan berdasarkan rencana strategis Dinas Perikanan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- 3) menetapkan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Perikanan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas Perikanan;
- 5) menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6) mengoordinasikan perumusan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya guna tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
- 8) menyelenggarakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- 9) menyelenggarakan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;

- 10) mengoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- 11) menyelenggarakan penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
- 12) menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- 13) menyelenggarakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- 14) menyelenggarakan penerbitan TPUPI;
- 15) menyelenggarakan penerbitan TPKPIH;
- 16) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah provinsi dibidang kelautan dan perikanan;
- 17) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 18) membina Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 19) mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional serta rencana kebutuhan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perikanan;
- 20) mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Dinas Perikanan;
- 21) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Perikanan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 22) membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 23) mengoordinasikan setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;

- 24) menyelenggarakan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 25) menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 26) melaporkan pelaksanaan program Dinas Perikanan dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 27) melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perikanan;
- 28) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 29) melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 30) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
- 31) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun **fungsi** Kepala Dinas yaitu:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

- d. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai **tugas** merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Perikanan. Sekretariat mempunyai **rincian tugas**:

- a. memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Perikanan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Perikanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
- c. merumuskan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perikanan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- f. menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- g. memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Perikanan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Perikanan;
- i. menyelia pengelolaan keuangan pada Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyelia pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Dinas Perikanan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perikanan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan di lingkungan Dinas Perikanan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perikanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan;
- o. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyelia penyusunan laporan keuangan Dinas Perikanan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. mengarahkan penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun **fungsi** sekretariat, yaitu:

- a. Perencanaan program kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- c. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai **tugas** melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perikanan. Sub Bagian Umum mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat;
- f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perikanan;
- g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Perikanan;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas Perikanan;
- i. mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas Perikanan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, penatausahaan, penyimpanan dan pemeliharaan;
- j. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perikanan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai **tugas** melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan keuangan pada Dinas Perikanan. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perikanan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perikanan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas Perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Dinas Perikanan;
- l. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perikanan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Perikanan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perikanan;
- p. memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perikanan;
- q. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan;
- r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Perikanan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan program dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai **tugas** memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan program Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Perikanan;
- b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perikanan Tangkap guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- g. memberi petunjuk penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- h. mengatur pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;

- i. melaksanakan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
- j. melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
- k. mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- l. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- n. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun **fungsi** Bidang Perikanan Tangkap, yaitu:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;

- c. Pelaksanaan pembinaan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- e. Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- g. Pelaporan dibidang pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan

Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan mempunyai **tugas** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan berdasarkan rencana kerja Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
- h. memeriksa data dan informasi sumber daya ikan;
- i. melaksanakan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
- j. melaksanakan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap;
- k. menyiapkan bahan pengawasan usaha perikanan tangkap;
- l. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas dan fungsi serta

kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai **tugas** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah.

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil berdasarkan rencana kerja Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- h. menyiapkan bahan pendampingan dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;

- i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan kecil;
- j. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan kecil;
- k. menyiapkan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil;
- l. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan nelayan kecil; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Seksi Pengelolaan TPI mempunyai **tugas** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Seksi Pengelolaan TPI mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan TPI berdasarkan rencana kerja Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan TPI berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- h. menyiapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- i. menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan TPI;
- j. mengontrol pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan TPI sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai **tugas** memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan program Bidang Perikanan Budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Perikanan;
- b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perikanan Budidaya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- g. memberi petunjuk penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. menyelia penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
- i. melaksanakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

- j. memberi petunjuk pengelolaan pembudidayaan ikan;
- k. melaksanakan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. melaksanakan penerbitan TPUPI;
- m. melaksanakan penerbitan TPKPIH;
- n. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun **fungsi** Bidang Perikanan Budidaya, yaitu:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- c. pelaksanaan pembinaan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- g. pelaporan dibidang izin usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan

Seksi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai **tugas** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH. Seksi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana kerja Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH;
- g. menyiapkan bahan koordinasi penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH;
- h. memeriksa penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
- i. menyiapkan bahan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
- j. memeriksa penerbitan TPUPI;
- k. memeriksa penerbitan TPKPIH;
- l. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH;
- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mempunyai **tugas** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dalam Daerah kabupaten. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan rencana kerja Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan kecil;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan kecil;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan kecil;
- h. menyiapkan bahan pendampingan dan pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan kecil;

- i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil;
- j. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan kecil;
- k. menyiapkan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- l. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan kecil;
- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan kecil; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pengelolaan Pembudidaya Ikan

Seksi Pengelolaan Pembudidaya Ikan mempunyai **tugas** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai **rincian tugas**:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana kerja Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. memeriksa penyajian data dan informasi pembudidayaan ikan;
- i. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- j. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- k. menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- l. menyiapkan bahan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- m. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- n. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
- o. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagai bahan pertanggungjawaban;

- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPTD

Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang kelautan dan perikanan. UPTD pada Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan klasifikasi yang ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain fungsi dan tugas yang telah dijabarkan sebelumnya, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Fungsi yang dijalankan mencakup:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, serta pengawasan sumber daya perikanan.
2. Penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup pengelolaan usaha perikanan, pembinaan pelaku utama, penyuluhan, serta penyediaan data dan informasi perikanan.

3. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional, termasuk fasilitasi sarana-prasarana, peningkatan kapasitas SDM, konservasi sumber daya ikan, serta pengawasan peredaran dan pemanfaatan sumber daya perikanan.
4. Pelaksanaan pengawasan dan konservasi melalui kegiatan monitoring, sosialisasi, operasi lapangan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.
5. Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan dan pengembangan subsektor perikanan agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah..

2.2. Sumberdaya Dinas Perikanan

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat. Jumlah aparatur pada Dinas Perikanan masih relatif terbatas, namun telah menunjukkan kompetensi teknis memadai. Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan tetap mendesak.

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat memiliki sumber daya manusia sebanyak 27 PNS dan 16 PPPK. Berdasarkan golongan dan pendidikan, sumber daya Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	43	29.45
2.	Non ASN	103	70.55
Jumlah		146	100

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2025

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)	%
1.	Eselon II	1	0.7
2.	Eselon III	3	2.05
3.	Eselon IV	7	4.79
4.	Staf	131	89.73
5.	Security	4	2.74
Jumlah		146	100

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	4	2.74
2.	III	22	15.07
3.	II	1	0.68
4	IX	12	8.22
5.	V	4	2.7
6.	Kontrak	103	70.55
Jumlah		146	100

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata-3 (S3)	0	0
2.	Strata-2 (S2)	5	3.42
3.	Strata-1 (S1)	64	43.84
4.	Diploma 3 (D3)	3	2.05
5.	SMP, SLTA/SMU/Paket C	74	50.68
Jumlah		146	100

2.2.2. Asset dan Unit Usaha

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana perikanan yang mencukupi. Data Aset dan Unit Usaha yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Sarana Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	AC Manual	13	Unit	10	3
2	Air	1	Jaringan	1	
3	Air Blower	1	Unit	1	
4	Aquarium	8	Unit	5	3
5	Area Parkir	3	Area	3	
6	Bak Air	2	Unit	2	
7	Box berkas	8	Unit	7	1
8	Buffet Kaca	1	Unit	1	
9	Berangkas Uang	1	Unit	1	
10	Calculator	1	Unit	1	
11	CCTV	2	Set	2	
12	CPU komputer	1	Unit	1	
13	Dispenser	11	Unit	10	1

14	Gedung	877,5	M2	877,5	
15	Generator	1	Unit	1	
16	Hardisk	9	Unit	8	1
17	Jam Dinding	1	Unit	1	
18	Kendaraan Roda 2	12	Unit	11	1
19	Kendaraan Roda 4	3	Unit	3	
20	Kipas Angin	6	Unit	6	
21	Kompor	1	Unit	1	
22	Kolam terpal	4	Unit	4	
23	Kulkas	6	Unit	6	
24	Kursi Panjang	1	Unit	1	
25	Kursi kayu	1	Unit		1
26	Kursi kerja	118	Unit	99	19
27	Kursi plastik	87	Unit	87	
28	Kursi Tamu	25	Unit	17	8
29	Laptop	32	Unit	29	3
30	Layar Proyektor	2	Unit	2	
31	Lemari Arsip	31	Unit	30	1
32	Listrik	1	Jaringan	1	
33	Loudspeaker	1	Unit	1	
34	Meja Kerja	123	Unit	114	9
35	Meja Panjang	1	Unit	1	
36	Meja Rapat	2	Unit	2	
37	Meja Rapat Model U	1	Set	1	
38	Meja Rapat ukuran Besar	1	Unit	1	
39	Mesin Absensi	1	Unit	1	
40	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	1	
41	Mesin penghancur kertas	1	Unit	1	
42	Mesin Pompa Air PMK	1	Unit	1	
43	Microphone	1	Unit	1	
44	Microphone Floor Stand	1	Unit	1	
45	Panel Surya	1	Unit	1	
46	Papan Nama Instansi	1	Unit	1	
47	Papan Pasak	4	Unit	4	
48	Personal Komputer (PC)	49	Unit	48	1
49	Printer	66	Unit	53	13
50	Pompa Air	4	Unit	2	2
51	Rice Cooker	1	Unit	1	
52	Scanner	8	Unit	8	
53	Sofa Tamu Kepala Dinas	2	Set	1	

54	Speaker	1	Unit	1	
55	Tanah	1352	M2	1352	
56	Tandon Air	2	Unit	2	
57	Tangga Alumunium	1	Unit	1	
58	Tong Sampah Besar	3	Unit	3	
59	Televisi	2	Unit	2	
60	UPS (Cadangan Listrik Komputer)	1	Unit	1	
61	Teralis	3	Unit	3	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan ditunjukkan melalui capaian indikator program strategis, baik di bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, maupun konservasi. Beberapa capaian kinerja pelayanan tahun 2020–2024 Tersaji Pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)				1.402	1.452	1.502	1.552	1.602	1.412	1.485	1.570,82	1.556,10	1.650	100,71%	102,27%	104,58 %	100,26%	103,00%
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)				1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	1.989	2.177	2.434	2.405,51	2.776	110,05%	108,85%	110,64%	100,23%	106,77%
3	Penetapan Kawasan Konservasi (SK)				0	49,8	0	0	1	0	49,8	0	0	1	0%	100,00%	0%	0%	100,00%
4	Konsumsi Ikan (Kg/Kp/Tahun)				37	38	39	40	41	37	38,05	39,05	40,53	41,24	100%	100,55%	100,90%	101,32%	100,59%
5	Ketersediaan Ikan (Ton/Tahun)				5.450	5.500	5.550	5600	5.650	5.451	5.530	5.600	5.620	5.719	100,01%	100,13%	100,13%	100,35%	101,22%

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan, melaksanakan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan kondisi umum pada saat ini. Sesuai dengan nomenklatur, urusan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat adalah Urusan Perikanan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **67,07** (Enam Puluh Tujuh koma Nol Tujuh) dengan predikat penilaian **B** (Baik) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 7 Penilaian SAKIP Tahun 2023 - 2024

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT (%)	NILAI 2023	NILAI 2024	KET
1	Perencanaan Kinerja	30	23,07	19,97	
2	Pengukuran Kinerja	20	24,25	21,60	
3	Pelaporan kinerja	15	9,75	11,00	
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	9,17	14,50	
NILAI Akuntabilitas Kinerja		100	66,23	67,07	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	Baik

Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Nilai Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 adalah **66,23** (Enam Puluh Enam Koma Dua Tiga) dengan predikat penilaian **B** (Baik), mengalami peningkatan sebesar **0,84** (Nol Koma Delapan Empat) instansi pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian. Capaian kinerja tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Bidang Perikanan Tangkap

 Bantuan Unit Mesin Untuk Nelayan KUB Kelawit Cemerlang Di Muara Kelawit	 Bantuan Perahu Fiber untuk Nelayan KUB Perikanan Tangkap di Kabupaten Kutai Barat
 Pembinaan POKMASWAS di Kampung Kelumpang	 Pemusnahan Barang Bukti Yang Bukan Tindak Pidana Perikanan di Danau Jempang
 Restocking Bibit Ikan Patin di Kampung Kelumpang	 Usaha POKLASAR Jone Sejahtera di Tanjung Jone

2. Kegiatan Bidang Perikanan Budidaya



Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan TDPIK di Kabupaten Kutai Barat



Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan TDPIK di Kabupaten Kutai Barat



Sosialisasi Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dalam Satu (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok



Kegiatan Verifikasi / CPCL Ke Kelompok Calon Penerima Bantuan Hibah Kepada Masyarakat Bantuan Kolam Bioflok Fullset Di Kampung Pepas Asa Kecamatan Barong Tongkok



Bantuan Kolam Bundar dan Bibit Benih Ikan POKDAKAN di Litaq, Bigung.



Bantuan Keramba Jaring Apung dan Bibit Benih Ikan di Kecamatan Muara Pahu.

2.3.1. Hasil Pelaksanaan Renstra Perikanan Tahun 2021-2024

Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Produksi perikanan tangkap yang optimal tidak hanya berkontribusi pada penyediaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tetapi juga mencerminkan efektivitas dan keberhasilan pengelolaan sumber daya tersebut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat.

Seiring dengan perkembangan yang terus dilakukan, pencapaian kinerja dalam sektor perikanan tangkap menjadi indikator yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat telah berhasil melebihi target-target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini tidak hanya mencerminkan kemampuan pengelolaan yang efektif, tetapi juga mencerminkan potensi besar yang dimiliki oleh sektor perikanan tangkap di daerah ini. Adapun faktor pendorong Bantuan sarana dan prasarana yang diberikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, setiap tahun terjadinya musim ikan di beberapa lokasi, Pengawasan di daerah tangkapan terawasi dengan baik oleh POKMASWAS. Sedangkan faktor penghambat produksi perikanan maraknya illegal fishing, tercemarnya lokasi tangkapan karena dampak kegiatan perkebunan, terbatasnya lokasi tangkapan serta keterbatasan teknologi penangkapan ikan.

Capaian kinerja untuk indikator produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kutai Barat antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Setiap tahunnya, capaian produksi tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melebihi ekspektasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sektor perikanan dan implementasi kebijakan yang efektif. Capaian ini tentunya memberikan gambaran yang baik untuk perencanaan strategis Dinas Perikanan dalam merumuskan target-target untuk periode 2025-2029, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah mendukung keberhasilan tersebut.

Produksi Perikanan Budidaya

Indikator produksi perikanan budidaya menjadi salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan sektor perikanan di Kabupaten Kutai Barat. Seiring dengan upaya peningkatan kapasitas dan efisiensi sektor ini, capaian kinerja dalam produksi perikanan budidaya menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari tahun 2020 hingga 2024, setiap tahunnya target yang ditetapkan berhasil tercapai dan bahkan melebihi ekspektasi. Target selama 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 7% setiap tahunnya. Faktor pendorong bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang diberikan pemerintah, pemilihan ikan (lele dan nila) yang dipelihara oleh pembudidaya dengan tingkat produksi yang cepat. Adapun faktor penghambat belum maksimal penerapan Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) di tingkat pembudidaya, penurunan kualitas perairan/lingkungan akibat aktivitas/kegiatan manusia dan tingginya harga pakan dipasaran. Hal ini menjadi bukti keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Kutai Barat. Pencapaian ini tentunya memberikan fondasi yang kuat untuk menetapkan target yang lebih lagi dalam periode 2025-2029, serta terus mendukung pertumbuhan sektor perikanan yang berkelanjutan.

Penetapan Kawasan Konservasi

Penetapan kawasan konservasi merupakan langkah penting dalam melestarikan sumber daya alam, khususnya di sektor perikanan dan lingkungan hidup. Di Kabupaten Kutai Barat, penetapan kawasan konservasi menjadi indikator yang krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan alam. Meskipun penetapan kawasan konservasi baru dimulai pada tahun 2021, progres yang telah tercapai menunjukkan komitmen yang kuat dari Dinas Perikanan dalam mewujudkan kawasan konservasi yang efektif.

Pada tahun 2020, belum ada kinerja yang tercatat terkait penetapan kawasan konservasi. Namun, pada tahun 2021, langkah awal yang signifikan dilakukan dengan berhasilnya penetapan 49,8 hektar kawasan konservasi.

Meskipun capaian ini masih terbilang awal, namun pencapaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan usaha untuk mulai mengelola kawasan konservasi sebagai bagian dari strategi pelestarian sumber daya alam.

Pada tahun 2022, proses penetapan kawasan konservasi masih berlangsung. Meskipun belum ada kawasan konservasi yang ditetapkan secara formal pada tahun tersebut, kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk mencapai target penetapan kawasan konservasi yang lebih luas di tahun-tahun mendatang. Proses ini mencerminkan langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk memastikan kawasan konservasi dapat dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2023, indikator kinerja berupa 1 SK penetapan kawasan konservasi tidak tercapai yang disebabkan oleh beberapa persoalan antara lain: adanya permohonan perubahan titik koordinat oleh POKMASWAS Jantaak Lestari Kampung Kelumpang, namun titik koordinat yang diminta belum bisa diputuskan karena terkendala waktu dari pihak pengusul, kemudian adanya izin usaha Perkebunan swasta yang berada di sekitar lokasi kawasan. Proses awal yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti kawasan ini masuk ke kawasan izin Perkebunan atau tidak yaitu dengan melaksanakan pertemuan atau rapat, namun pihak pemilik izin tidak menghadiri pertemuan tersebut. Barulah pada tahun 2024, semua proses dapat terlaksana dengan baik sehingga target 1 SK tercapai dengan terbitnya satu Surat Keputusan (SK) Reservat Danau Jantaq Nomor 523/K.1641/2024 Tanggal 27 November 2024 tentang Penetapan Danau Jantaq Kampung Kelumpang Kecamatan Mook Manaar Bulatn sebagai Daerah Perairan Umum yang Dilindungi. Dengan luas area 90,74 Ha. Hal ini menunjukkan upaya dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan ekosistem perairan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan perikanan.

Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan sektor perikanan dalam memenuhi kebutuhan gizi

masyarakat. Di Kabupaten Kutai Barat, peningkatan konsumsi ikan dapat menunjukkan efektivitas kebijakan dalam mendorong pola makan sehat serta pemanfaatan potensi perikanan lokal yang ada. Capaian kinerja untuk indikator ini antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang konsisten, dengan tingkat konsumsi yang selalu memenuhi atau bahkan sedikit melebihi target yang ditetapkan.

Ketersediaan Ikan

Ketersediaan ikan merupakan indikator yang sangat penting dalam menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan berbasis sumber daya alam perikanan. Di Kabupaten Kutai Barat, indikator ini tidak hanya menggambarkan potensi produksi perikanan yang ada, tetapi juga mencerminkan keberhasilan pengelolaan sektor perikanan dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. Capaian kinerja untuk indikator ketersediaan ikan pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan setiap tahunnya ketersediaan ikan selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

2.3.2. Kelompok Layanan sasaran

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat memiliki kelompok sasaran layanan yang luas, yang mencakup masyarakat perikanan, dunia usaha, maupun perangkat daerah lain sebagai mitra koordinasi. Secara lebih rinci, kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan meliputi:

1. Nelayan tradisional dan nelayan kecil
Sebagai penerima layanan utama berupa fasilitasi sarana prasarana tangkap, pelatihan teknologi penangkapan ikan, pemberdayaan kelompok nelayan, serta akses pembiayaan.
2. Pembudidaya ikan
Mencakup individu maupun kelompok pembudidaya, yang mendapatkan layanan berupa penyediaan benih unggul, pakan, teknologi budidaya ramah lingkungan, pelatihan teknis, serta dukungan permodalan.
3. Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Terutama UMKM dan koperasi perikanan, sebagai penerima layanan dalam bentuk penguatan kapasitas, pengembangan teknologi pengolahan ikan, fasilitasi sertifikasi mutu, promosi produk, dan akses pasar.

4. Masyarakat umum/konsumen

Sebagai sasaran dalam upaya peningkatan konsumsi ikan, edukasi gizi berbasis ikan, dan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

5. Pemerintah desa dan kecamatan

Sebagai mitra layanan koordinatif dalam pengembangan kawasan perikanan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta fasilitasi integrasi pembangunan sektor perikanan ke dalam dokumen perencanaan desa/kecamatan.

6. Perangkat Daerah Lain (Internal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat):

- o Bappeda Litbang: sebagai mitra koordinasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi RPJMD, RKPD, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor perikanan.
- o Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan: dalam integrasi program ketahanan pangan berbasis ikan dan diversifikasi pangan.
- o Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan: dalam penguatan usaha mikro perikanan, pengembangan pasar, serta akses distribusi produk perikanan.
- o Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan: dalam program peningkatan gizi anak sekolah, edukasi konsumsi ikan, serta kampanye Gemarikan.
- o Dinas Lingkungan Hidup: dalam konservasi ekosistem perairan, pengendalian pencemaran, serta pengelolaan kawasan konservasi perairan.

- o Dinas Pariwisata: dalam pengembangan destinasi wisata berbasis perikanan (misalnya wisata memancing, kuliner ikan lokal, dan ekowisata perairan).
 - o Inspektorat dan BPKAD: dalam mendukung akuntabilitas keuangan, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - o DPMPTSP: dalam mendukung Layanan perizinan (SIUP, izin budidaya)
 - o Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pengembangan infrastruktur perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (pembangunan TPI dan *cold storage*)
 - o Satpol PP: dalam pengawasan penegakan PERDA Illegal fishing
7. Lembaga pendidikan dan penelitian, serta organisasi masyarakat/LSM Sebagai mitra dalam riset, inovasi teknologi, pendampingan masyarakat, dan advokasi kebijakan di bidang perikanan.

2.4. Permasalahan Dan Isu Strategis Pelayanan Dinas Perikanan

2.4.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Periode 2020–2024 menunjukkan capaian positif Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat, di antaranya peningkatan produksi perikanan tangkap rata-rata 8% per tahun dan peningkatan kepatuhan nelayan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan terutama pada aspek pengawasan penangkapan ikan, terlihat dari keterbatasan armada patroli dan minimnya pelaporan pelanggaran. Tantangan lainnya adalah peningkatan nilai tambah produk perikanan agar kontribusinya terhadap PDRB daerah semakin signifikan.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat merupakan hasil identifikasi terhadap kondisi eksisting pelayanan, capaian kinerja, serta analisis kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan penyelenggaraan layanan. Permasalahan ini penting untuk dirumuskan sebagai

dasar penetapan isu strategis, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan perangkat daerah pada periode 2025–2029.

Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat pada periode 2020–2024 dianalisis dengan pendekatan aspek tugas dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran layanan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan penguatan pada periode 2025–2029. Meskipun berbagai capaian positif telah diraih, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Aspek Tugas dan Fungsi

- Sebagian fungsi pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap di perairan umum masih belum berjalan optimal, khususnya dalam pelaksanaan patroli dan tindak lanjut pelanggaran.
- Kewenangan Dinas Perikanan cukup luas, namun pelaksanaan di lapangan sering terkendala keterbatasan koordinasi lintas sektor, misalnya dengan aparat penegak hukum atau dinas teknis lain.
- Fungsi perencanaan dan evaluasi program sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya berbasis data digital dan real-time.

2. Aspek Sumber Daya

- Dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana telah mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, namun hasil identifikasi menggambarkan bahwa ketersediaan SDM aparatur masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi teknis (penyuluh perikanan, pengawas perikanan, tenaga pengolahan hasil).
- Sarana prasarana pendukung pelayanan seperti balai benih ikan (BBI), cold storage, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sarana distribusi, dan laboratorium mutu hasil perikanan masih terbatas kapasitas dan kualitasnya serta belum terdistribusi secara merata di daerah terpencil di Kabupaten Kutai Barat.

- Anggaran yang tersedia melalui APBD relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan program prioritas, sehingga banyak kegiatan strategis perlu dukungan dana dari pusat atau hibah.

3. Aspek Kinerja Pelayanan

- Beberapa indikator pelayanan sudah melampaui target (misalnya peningkatan produksi perikanan budidaya dan capaian nilai tukar nelayan), namun tantangan baru muncul dalam **menjaga keberlanjutan capaian** tersebut agar tidak menurun di periode berikutnya.
- Kualitas pelayanan pengawasan perikanan masih lemah, ditandai dengan rendahnya frekuensi patroli dan sistem pelaporan pelanggaran yang belum efektif.
- Layanan perizinan (SIUP, izin budidaya) relatif sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan ke arah layanan digital yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi dengan sistem OSS (*Online Single Submission*).
- Layanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan belum mampu meningkatkan daya saing produk lokal secara signifikan, karena keterbatasan teknologi pengolahan dan belum kuatnya jaringan pemasaran sehingga diperlukan penguatan layanan berbasis digital dan peningkatan jangkauan pelayanan di wilayah perairan terpencil.

4. Aspek Kelompok Sasaran Layanan

- Kelompok sasaran layanan, terutama nelayan dan pembudidaya, telah memperoleh manfaat program berupa bantuan sarana, pelatihan, dan akses pasar. Namun, tingkat adopsi teknologi masih rendah, sehingga produktivitas belum maksimal di sebagian kelompok..
- Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kutai Barat masih di bawah target nasional, dipengaruhi oleh keterbatasan distribusi, harga, dan preferensi konsumsi.
- Nelayan kecil dan pembudidaya tradisional masih menghadapi keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan pasar.

- Kelembagaan nelayan/pembudidaya belum seluruhnya aktif dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi anggota.
- Akses pasar produk perikanan, masih terbatas pada lingkup lokal, sehingga nilai tambah yang diperoleh pelaku usaha masih rendah.
- Koordinasi antar perangkat daerah terkait sektor perikanan belum terbangun secara optimal, sehingga terjadi tumpang tindih dan kesenjangan dalam implementasi program lintas sektor.

Secara umum, permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dapat disimpulkan dalam tiga aspek utama:

1. Kapasitas internal perangkat daerah yang masih terbatas baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun sarana prasarana.
2. Kinerja pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi target kinerja sesuai tupoksi urusan perikanan.
3. Keterhubungan dengan kelompok sasaran dan stakeholder yang belum optimal, ditandai dengan rendahnya partisipasi, kapasitas kelompok masyarakat perikanan, serta koordinasi antar perangkat daerah.

Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat

Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Akar Masalah
Peningkatan produktivitas perikanan tangkap di perairan umum daratan	- Perlu pengelolaan stok ikan endemik agar berkelanjutan - Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan perlu diperluas - Armada dan sarana penangkapan perlu ditingkatkan	- Pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat - Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan - Inovasi teknologi ramah lingkungan perlu dikembangkan - Data stok ikan perlu dimutakhirkan secara berkala
Pengembangan perikanan budidaya berdaya saing	- Produktivitas budidaya perlu ditingkatkan - Kualitas lingkungan budidaya perlu dijaga - Teknologi budidaya perlu diperluas - Akses pakan, benih, dan modal perlu diperkuat	- Kompetensi SDM pembudidaya perlu ditingkatkan - Rantai pasok input produksi perlu distabilkan - Kelembagaan pembudidaya perlu diperkuat - Infrastruktur pendukung budidaya perlu ditingkatkan
Penguatan pengolahan dan pemasaran hasil	- Produk perlu diarahkan ke olahan bernilai tambah	- Fasilitas pengolahan perlu dimodernisasi

Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Akar Masalah
perikanan	- Penerapan standar mutu dan higienitas perlu diperluas - Akses pasar perlu diperluas dan stabil - Distribusi hasil perikanan perlu lebih efisien	- SDM pengolah perlu ditingkatkan kapasitasnya - Jejaring pasar perlu diperkuat - Akses pembiayaan usaha perlu diperluas
Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung	- TPI perlu difungsikan lebih optimal - Rantai dingin dan cold storage perlu diperkuat - Akses jalan menuju sentra perikanan perlu ditingkatkan	- Anggaran pembangunan dan pemeliharaan sarpras perlu ditingkatkan - Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat
Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pelaku utama perikanan	- Organisasi nelayan dan pembudidaya perlu diperkuat - Kelompok usaha bersama perlu lebih aktif - Literasi digital dan akses informasi pelaku utama perlu ditingkatkan	- Pendampingan dan pelatihan perlu diperluas - Koordinasi kelembagaan lintas desa/kecamatan perlu ditingkatkan - Insentif kelembagaan usaha perlu diperkuat
Penguatan SDM, data, dan tata kelola perikanan	- Jumlah dan kapasitas penyuluh perikanan perlu ditingkatkan - Perencanaan, monitoring, dan evaluasi perlu diperkuat - Data statistik perikanan perlu lebih akurat dan terintegrasi	- Kompetensi SDM aparatur perlu ditingkatkan - Sistem informasi perikanan perlu dioptimalkan - Anggaran Monev dan basis data perlu diperkuat
Pengendalian degradasi lingkungan perairan	- Kualitas lingkungan perairan perlu dijaga dari sedimentasi dan pencemaran - Adaptasi terhadap perubahan iklim perlu diperkuat - Habitat ikan perlu dilindungi dari alih fungsi lahan	- Regulasi pengendalian lingkungan perlu ditegakkan - Koordinasi lintas sektor dalam rehabilitasi perlu diperkuat - Kesadaran masyarakat menjaga lingkungan perlu ditingkatkan

2.4.2. Isu Strategis Pelayanan Dinas Perikanan

Isu strategis merupakan kondisi penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan sektor perikanan karena berpengaruh signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Perumusan isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat 2025–2029 didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan, isu lingkungan strategis yang bersifat global, nasional, dan regional, serta potensi yang dimiliki daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029, juga diperlukan identifikasi isu strategis sebagai landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan perikanan daerah. Isu strategis dirumuskan melalui analisis menyeluruh yang mencakup:

- **Permasalahan internal** yang dihadapi Dinas Perikanan, baik pada aspek tugas dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan, maupun kelompok sasaran layanan.
- **Dinamika lingkungan strategis** yang berkembang di tingkat global, nasional, regional, dan lokal, seperti perubahan iklim, tuntutan standar mutu produk, kebijakan pembangunan ekonomi biru, serta peluang pasar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- **Potensi daerah** yang menjadi kewenangan perangkat daerah, antara lain perairan umum daratan Mahakam dan anak sungainya, danau, rawa, dan potensi budidaya air tawar lainnya, UMKM pengolahan hasil perikanan, serta posisi strategis Kutai Barat sebagai hinterland pemasok pangan ikan untuk Kalimantan Timur dan IKN.

Hasil sintesis dari permasalahan, lingkungan strategis, dan potensi daerah tersebut mengerucut pada enam isu strategis utama yang akan menjadi fokus pembangunan perikanan Kabupaten Kutai Barat periode 2025–2029, yaitu:

1. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan tangkap di perairan umum.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya air tawar berbasis teknologi ramah lingkungan.
3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan melalui pengembangan industri pengolahan dan sertifikasi mutu.
4. Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia nelayan, pembudidaya, dan aparatur teknis.
5. Pengembangan sarana, prasarana, dan dukungan pembiayaan usaha perikanan.
6. Integrasi pembangunan perikanan dengan pengembangan ekonomi daerah dan IKN untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 9 Isu Strategis Perangkat Dinas Perikanan Kutai Barat

No.	Potensi Daerah (Kewenangan PD)	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan yang Relevan			Isu Strategis PD
				Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
1	Perikanan tangkap di perairan umum daratan	Produktivitas perikanan tangkap masih rendah; praktik penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan; pengawasan stok ikan belum optimal	Pemanfaatan berkelanjutan SDA	SDGs 14 (<i>Life below water</i>)	<i>Blue Economy</i>	Penurunan stok ikan di DAS Mahakam dan danau/ rawa Kubar	Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan perikanan tangkap di perairan umum daratan
2	Budidaya perikanan air tawar dan payau	Akses terhadap benih unggul, pakan, dan permodalan masih terbatas; teknologi budidaya belum optimal; rentan terhadap	Ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan	SDGs 2 (<i>Food Security</i>)	Program ketahanan pangan & peningkatan produksi budidaya	Kemandirian pangan Kaltim (IKN & sekitarnya)	Pengembangan perikanan budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan, dan ramah lingkungan

		penyakit ikan					
3	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Nilai tambah hasil perikanan masih rendah; unit pengolahan sederhana; akses pasar terbatas; branding produk lemah	Ekonomi biru, konsumsi dan produksi berkelanjutan	SDGs 12 (<i>Responsible consumption & production</i>)	Industrialisasi perikanan (KKP)	Hilirisasi perikanan Kaltim & dukungan IKN	Penguatan industri pengolahan & pemasaran hasil perikanan berbasis nilai tambah dan standar mutu
4	Sarana prasarana perikanan (TPI, cold storage, rantai dingin)	Ketersediaan sarana prasarana terbatas; sebagian tidak berfungsi optimal; keterhubungan ke sentra produksi belum memadai	Efisiensi energi dan infrastruktur hijau	SDGs 9 (<i>Industry, innovation, infrastructure</i>)	Modernisasi rantai dingin nasional	Infrastruktur perikanan Kaltim	Pengembangan sarana prasarana perikanan yang memadai dan berkelanjutan
5	Kelembagaan nelayan, pembudidaya, dan pelaku	Organisasi nelayan, KUB, pokdakan, dan koperasi masih	Pemberdayaan masyarakat	SDG 8 (<i>Decent work & economic growth</i>)	Pemberdayaan nelayan & pembudidaya (KKP)	Pemberdayaan Pokdakan, KUB, koperasi Kaltim	Penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya,

	usaha	lemah; kemampuan manajerial dan akses informasi rendah					dan pelaku usaha perikanan
6	SDM dan tata kelola perikanan daerah	Jumlah penyuluh dan kompetensi aparatur terbatas; sistem data belum terintegrasi; perencanaan dan Monev belum berbasis data	Tata kelola pemerintahan yang baik	SDGs 16 – <i>Strong Institutions</i>	Reformasi birokrasi & digitalisasi data (KKP)	Integrasi data perikanan Kaltim	Peningkatan kapasitas SDM, tata kelola, dan sistem data perikanan daerah
7	Lingkungan perairan dan ekosistem	Pencemaran perairan meningkat; degradasi habitat perairan umum; adaptasi perubahan iklim masih rendah	Perlindungan lingkungan hidup	SDGs 13. <i>Climate change</i>	Pengendalian lingkungan & rehabilitasi DAS	Rehabilitasi perairan Kubar & DAS Mahakam	Pengendalian degradasi lingkungan perairan dan adaptasi perubahan iklim
8	Sinergi pembangunan perikanan	Integrasi program perikanan	Konektivitas pembangunan wilayah	SDGs 17 – <i>Partnership for Goals</i>	Sinergi pembangunan nasional & IKN	Integrasi program perikanan	Sinergi pembangunan perikanan

	dengan IKN & lintas sektor	dengan sektor lain (pertanian, lingkungan, pariwisata) belum optimal; peluang pasar IKN belum dimanfaatkan				Kaltim dengan IKN	daerah dengan pengembangan IKN dan lintas sektor
--	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

Tabel 2.9 di atas merangkum isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat yang diturunkan dari pemetaan permasalahan (Tabel 2.8) dan selaras dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Isu-isu tersebut mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025–2029, antara lain pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan, penguatan budidaya berdaya saing, industrialisasi perikanan, modernisasi sarpras, pemberdayaan pelaku utama, digitalisasi tata kelola, dan pengendalian dampak perubahan iklim.

Selain itu, isu strategis ini konsisten dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan daya saing produk, penguatan kelembagaan masyarakat perikanan, integrasi data sektoral, serta rehabilitasi lingkungan perairan.

Dengan demikian, isu strategis yang dirumuskan tidak hanya menjawab tantangan internal daerah, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional, termasuk integrasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan konsep *Blue Economy*.

Berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan, serta isu lingkungan yang relevan, diperoleh delapan isu strategis utama sektor perikanan di Kabupaten Kutai Barat. Berikut adalah uraian ringkas setiap isu strategis:

1. **Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan perikanan tangkap di perairan umum daratan**

Sektor perikanan tangkap menghadapi tantangan berupa produktivitas yang masih rendah, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dan lemahnya pengawasan stok ikan. Oleh karena itu, isu strategis diarahkan pada penguatan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan melalui teknologi ramah lingkungan dan peningkatan sistem pengawasan.

2. **Pengembangan perikanan budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan, dan ramah lingkungan**

Permasalahan utama budidaya adalah keterbatasan benih, pakan, modal, serta kerentanan terhadap penyakit ikan. Isu strategis yang diangkat adalah mendorong pengembangan budidaya yang efisien, ramah lingkungan, serta berorientasi pasar dengan dukungan akses teknologi dan permodalan.

3. **Penguatan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis nilai tambah dan standar mutu**

Rendahnya nilai tambah produk, terbatasnya unit pengolahan modern, dan lemahnya akses pasar menjadi tantangan utama. Isu strategis diarahkan pada penguatan industri pengolahan yang higienis, berstandar mutu, serta memiliki branding dan daya saing lebih baik di pasar regional maupun nasional.

4. **Pengembangan sarana prasarana perikanan yang memadai dan berkelanjutan**

Keterbatasan dan ketidakefektifan fungsi TPI, cold storage, dan rantai dingin masih menjadi kendala. Oleh karena itu, isu strategis difokuskan pada pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana perikanan yang mendukung efisiensi produksi, distribusi, dan menjaga mutu hasil perikanan.

5. **Penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan**

Kelembagaan pelaku utama seperti KUB, pokdakan, dan koperasi masih lemah dari sisi manajerial, akses informasi, dan jejaring usaha. Isu strategis diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan agar lebih adaptif, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

6. **Peningkatan kapasitas SDM, tata kelola, dan sistem data perikanan daerah**

Jumlah penyuluh dan kompetensi aparatur terbatas, sementara sistem data sektoral belum terintegrasi. Isu strategis diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan

sistem informasi dan data perikanan yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.

7. **Pengendalian degradasi lingkungan perairan dan adaptasi perubahan iklim**

Pencemaran, degradasi habitat perairan umum, dan rendahnya adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi permasalahan utama. Isu strategis diarahkan pada pengendalian pencemaran, rehabilitasi ekosistem, serta integrasi program adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan perikanan daerah.

8. **Sinergi pembangunan perikanan daerah dengan pengembangan IKN dan lintas sector**

Integrasi pembangunan perikanan dengan sektor lain (pertanian, lingkungan, pariwisata) dan pemanfaatan peluang pasar IKN belum optimal. Isu strategis diarahkan pada penguatan sinergi pembangunan lintas sektor serta integrasi dengan pembangunan IKN untuk memperluas peluang pasar dan investasi perikanan.

Dengan demikian, delapan isu strategis yang telah dirumuskan tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat pada periode perencanaan 2025–2029. Isu-isu ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan pembangunan sektor perikanan di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provisi/Kabupaten Tahun 2025-2029

Penetapan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 didasarkan pada dua aspek utama, yaitu:

- a. **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), meliputi:
 - Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
 - Penguatan ketahanan pangan berbasis ikan serta peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
 - Pengembangan nilai tambah, daya saing, dan hilirisasi produk perikanan.
 - Penerapan praktik perikanan berkelanjutan dan konservasi sumber daya perairan.
 - Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bidang perikanan.
- b. **Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029** yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemantapan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, transformasi ekonomi pasca-batu bara, serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan akses

- benih dan pakan berkualitas, serta penerapan teknologi ramah lingkungan.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perikanan dengan memperkuat akses permodalan, pemberdayaan kelompok usaha, dan peningkatan kapasitas SDM perikanan.
 3. Meningkatkan nilai tambah, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan melalui penguatan unit pengolahan ikan (UPI), diversifikasi produk olahan, sertifikasi mutu, serta promosi produk perikanan lokal.
 4. Memantapkan pengawasan dan konservasi sumber daya perikanan dengan pengembangan kawasan konservasi, rehabilitasi habitat, serta pengendalian praktik penangkapan tidak ramah lingkungan.
 5. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan diversifikasi produk pangan berbasis ikan.
 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan pelayanan publik dengan memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta digitalisasi layanan perikanan.
 7. Meningkatkan keterpaduan pembangunan sektor perikanan lintas perangkat daerah dan multipihak untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan kedua acuan tersebut, serta hasil telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah, permasalahan, isu strategis, dan potensi daerah, maka tujuan pembangunan subsektor perikanan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 adalah:

“Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi sektor unggulan daerah, khususnya sektor perikanan, yang berkelanjutan dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Tujuan ini menjadi arah strategis yang diwujudkan melalui peningkatan kapasitas produksi, pengolahan, pemasaran, pengawasan, serta tata kelola pelayanan publik di bidang perikanan, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat.

3.1.2. Sasaran Renstra pada Provinsi/Kabupaten Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan, serta menjadi tolok ukur capaian kinerja pembangunan subsektor perikanan. Penentuan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 didasarkan pada:

- a. **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** yang berlaku dalam urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
- b. **Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029** yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya produksi dan nilai tambah perikanan.**
Diukur melalui kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, dengan target kenaikan dari **1,41% pada tahun 2024** menjadi **1,56% pada tahun 2029**.
2. **Meningkatnya produktivitas pengembangan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.**
 - o Produksi perikanan tangkap ditargetkan naik dari **1.602 ton (2024)** menjadi **1.852 ton (2029)**.
 - o Produksi perikanan budidaya ditingkatkan dari **2.600 ton (2024)** menjadi **3.600 ton (2029)**.
3. **Perlindungan sumber daya perikanan dan pengawasan wilayah tangkap.**
Terukur melalui kawasan konservasi daerah yang operasional, dari kondisi awal **0 ha (2024)** menjadi **80 ha pada tahun 2029**.
4. **Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat.**
Angka konsumsi ikan per kapita ditingkatkan dari **41 kg/kapita/tahun (2024)** menjadi **46 kg/kapita/tahun pada 2029**.
5. **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.**
Diukur dengan indikator Nilai SAKIP (Skor), ditargetkan **67,07 Tahun 2024** menjadi **69,57 tahun 2029**.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 telah disusun secara konsisten berdasarkan **NSPK** dan **RPJMD**, serta mencerminkan keterpaduan antara kebijakan nasional, daerah, dan kondisi riil subsektor perikanan di Kutai Barat.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kutai Barat

Dalam rangka menjamin konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan arah pembangunan daerah, perlu dilakukan telaah terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat. Telaah ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah harus disusun dengan berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat 2025–2029 diarahkan untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

a. Visi Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029 adalah:

“Terwujudnya Kutai Barat yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal.”

Visi ini mengandung makna bahwa pembangunan Kutai Barat diarahkan untuk memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, dengan tetap mengedepankan potensi dan keunggulan lokal. Bagi sektor perikanan, visi ini mengandung makna penting bahwa pengelolaan dan pengembangan subsektor perikanan harus diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan perairan.

b. Misi Kepala Daerah

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan sejumlah misi pembangunan daerah yang relevan dengan sektor perikanan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Relevansi dengan sektor perikanan: peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha melalui pemberdayaan ekonomi serta peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan.

2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Relevansi dengan sektor perikanan: penguatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil perikanan bernilai tambah, serta penguatan rantai pasok untuk mendukung ketahanan pangan dan membuka peluang pasar, termasuk sebagai penyangga IKN.

3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Relevansi dengan sektor perikanan: peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pelayanan publik berbasis transparansi, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat.

4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Relevansi dengan sektor perikanan: pengawasan sumber daya ikan, konservasi ekosistem perairan, serta pengendalian aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan.

Misi ini menjadi landasan dalam menetapkan arah kebijakan sektor perikanan, terutama dalam hal peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem perairan.

c. Program Prioritas Kepala Daerah

Program prioritas kepala daerah yang selaras dengan urusan perikanan meliputi:

1. Program Ketahanan Pangan Daerah, dengan fokus meningkatkan produksi dan distribusi pangan berbasis perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Program Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Lokal, melalui pengembangan UMKM pengolahan hasil perikanan, promosi produk, serta penguatan akses pasar.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, termasuk pemberdayaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kecil sektor perikanan.
4. Program Konservasi dan Pengendalian Lingkungan, termasuk rehabilitasi habitat perairan, penguatan kawasan konservasi perairan daratan, serta peningkatan patroli pengawasan sumber daya ikan.
5. Program Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan sasaran peningkatan akuntabilitas, kualitas layanan, dan pemenuhan SPM urusan perikanan.

d. Keterkaitan Visi, Misi, dan Program dengan Renstra Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat memiliki kewenangan dalam pengelolaan subsektor perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran, serta pengawasan sumber daya ikan. Oleh karena itu, visi, misi, dan program Kepala Daerah tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembangunan subsektor perikanan, antara lain:

- Misi pengembangan ekonomi daerah berdaya saing → sejalan dengan strategi peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan.
- Misi peningkatan kesejahteraan masyarakat → didukung melalui pemberdayaan nelayan, pembudidaya, dan pelaku UMKM perikanan.
- Misi menjaga kelestarian lingkungan → diwujudkan melalui pengawasan perikanan, konservasi perairan, dan penerapan prinsip keberlanjutan.

- Program ketahanan pangan daerah → berhubungan erat dengan peningkatan ketersediaan ikan dan konsumsi ikan masyarakat Kutai Barat.

Dengan demikian, Dinas Perikanan memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, melalui program dan kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di Kabupaten Kutai Barat.

Gambaran terkait Keterkaitan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat 2025–2029, tersaji pada Tabel 3.1. Tabel ini penting untuk menunjukkan *alignment* antara RPJMD dengan Renstra Dinas Perikanan.

Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dengan Dukungan dan Fokus Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat 2025-2029

Visi/Misi/Program Kepala Daerah	Dukungan Dinas Perikanan	Fokus Kinerja Dinas Perikanan
Visi: “Terwujudnya Kutai Barat yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal.”	Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.	Seluruh sasaran bidang perikanan (produksi, nilai tambah, konservasi, distribusi, konsumsi, pelayanan publik).
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui peningkatan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.	- Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat (41 kg → 46 kg/kapita/tahun).
Misi 2: Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.	Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.	- Meningkatnya produksi perikanan tangkap (1.602 ton → 1.852 ton). - Meningkatnya produksi perikanan budidaya (2.600 ton → 3.600 ton). - Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (1,41% → 1,56%).
Misi 3: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di bidang perikanan.	Meningkatnya kinerja Nilai SAKIP (67,07 → 69,57)
Misi 4: Menjaga kelestarian lingkungan	Meningkatkan perlindungan sumber daya	- Luas kawasan konservasi perairan

hidup dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.	perikanan dan pengawasan perairan umum daratan.	umum daratan meningkat (0 ha → 80 ha). - Meningkatnya pengawasan sumber daya ikan berbasis keberlanjutan.
Program Prioritas: Ketahanan pangan daerah.	Menjamin ketersediaan protein berbasis ikan bagi masyarakat.	- Peningkatan ketersediaan hasil perikanan. - Peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
Program Prioritas: Peningkatan nilai tambah ekonomi lokal.	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan lokal.	- Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. - Diversifikasi produk perikanan.
Program Prioritas: Pemberdayaan masyarakat perdesaan.	Pemberdayaan nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan.	- Penguatan kelembagaan kelompok perikanan. - Peningkatan kapasitas SDM perikanan.
Program Prioritas: Konservasi dan pengendalian lingkungan.	Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.	- Penetapan kawasan konservasi perairan umum daratan. - Peningkatan efektivitas pengawasan perikanan.
Program Prioritas: Reformasi birokrasi	Meningkatkan transparansi,	Meningkatnya kapasitas dan

dan pelayanan publik.	akuntabilitas, dan kualitas layanan Dinas Perikanan.	akuntabilitas birokrasi.
-----------------------	--	--------------------------

Tabel 3. 2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan Kutai Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterangan
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Perikanan											
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Perikanan		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)	1.41	1.44	1.47	1.50	1.53	1.56	1.59	
		Meningkatnya Produktivitas Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.602	1.652	1.702	1.752	1.802	1.852	1.902	
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	
		Perlindungan Sumber Daya Perikanan dan Pengawasan Wilayah Tangkap	Kawasan Konservasi Daerah yang Operasional (Ha)	-	-	50	60	70	80	90	
		Meningkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (KG/KAP/TH)	41	42	43	44	45	46	47	
		Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi	Nilai SAKIP (Skor)	67,07	67,57	68,07	68,57	69,07	69,57	70,07	

Dengan demikian, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Kutai Barat, baik sebagai penggerak ekonomi lokal, penopang ketahanan pangan, maupun penjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, Renstra Dinas Perikanan 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program perangkat daerah selaras dengan visi pembangunan daerah dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Kutai Barat yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2025–2029, serta selaras dengan kebijakan nasional di bidang kelautan dan perikanan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman umum dalam pengambilan keputusan dan perumusan program/kegiatan perangkat daerah, agar lebih terarah, fokus, dan konsisten terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan.

Keterkaitan Isu Strategis dengan Tujuan dan Sasaran

Isu strategis yang telah dirumuskan di atas memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan, yaitu:

- Menjawab tantangan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi ikan.
- Mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi daerah dengan peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

- Menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan melalui konservasi, pengawasan, dan pengendalian aktivitas perikanan.
- Memperkuat kesejahteraan masyarakat perikanan melalui pemberdayaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku UMKM.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perikanan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029, pembangunan sektor perikanan dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan terukur. Penahapan ini disusun untuk memastikan ketercapaian target indikator kinerja perangkat daerah, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kapasitas kelembagaan, serta dinamika lingkungan strategis.

Tahapan pembangunan tahunan dapat diuraikan sebagai berikut:

3. **Tahap I (2026): Penguatan Fondasi**

Fokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan sarana prasarana dasar perikanan (balai benih ikan, sarana distribusi, dan laboratorium mutu). Pada tahap ini juga dimulai kampanye konsumsi ikan masyarakat serta perbaikan sistem pelayanan publik berbasis digital.

4. **Tahap II (2027): Akselerasi Produksi dan Distribusi**

Penekanan pada peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui dukungan teknologi, benih unggul, dan akses permodalan. Distribusi hasil perikanan diperkuat dengan pembangunan rantai dingin, serta pengembangan pasar lokal.

5. **Tahap III (2028): Pengembangan Hilirisasi dan Nilai Tambah**

Fokus diarahkan pada peningkatan daya saing produk perikanan lokal melalui pengolahan, diversifikasi produk, dan perluasan jaringan pemasaran. Sektor UMKM perikanan diperkuat dengan dukungan kelembagaan, pelatihan, dan fasilitasi perizinan usaha.

6. **Tahap IV (2029): Pemantapan Konservasi dan Ketahanan Pangan**

Tahap ini mengutamakan keberlanjutan melalui perluasan kawasan konservasi perairan umum daratan, penguatan pengawasan sumber daya

perikanan, serta peningkatan efektivitas program *Gemarikan* untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

7. Tahap V (2030): Keberlanjutan dan Kemandirian Daerah

Pada tahap akhir, fokus diarahkan pada pencapaian kemandirian sektor perikanan yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan berkontribusi optimal terhadap PDRB daerah. Sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel ditargetkan sudah terintegrasi penuh dengan sistem pemerintahan daerah.

Dengan pola tahapan tersebut, pembangunan perikanan diharapkan mampu mewujudkan produktivitas yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat perikanan, peningkatan konsumsi ikan, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Tabel 3.3 menggambarkan Proses penahapan Dinas Perikanan Kutai Barat

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan kelembagaan, SDM, dan sarana prasarana dasar perikanan.	Akselerasi produksi tangkap dan budidaya, pembangunan rantai dingin, penguatan distribusi.	Pengembangan hilirisasi, pengolahan, diversifikasi produk, dan pemasaran hasil perikanan.	Pemantapan konservasi, pengawasan sumber daya ikan, dan ketahanan pangan berbasis program <i>Gemarikan</i> .	Keberlanjutan dan kemandirian sektor perikanan, kontribusi optimal terhadap PDRB, pelayanan publik terintegrasi.

Arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan perangkat daerah, serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Barat. Arah kebijakan ini disusun untuk memastikan keterpaduan antara strategi pembangunan nasional, provinsi, dan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Operasionalisasi NSPK menjadi landasan utama dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan sektor perikanan, mulai dari peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil, konservasi sumber daya perairan, peningkatan konsumsi ikan, hingga tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, arah kebijakan RPJMD memberikan kerangka prioritas pembangunan daerah yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan sektoral.

Dengan demikian, arah kebijakan Renstra Dinas Perikanan 2025–2029 ditetapkan untuk mewujudkan produktivitas yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan, penguatan daya saing produk, kelestarian sumber daya perairan, serta pelayanan publik yang berkualitas. Arah kebijakan Renstra Dinas Perikanan tersaji pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kutai Barat 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah	Penguatan pengawasan dan pengendalian alat tangkap; pengelolaan stok ikan berbasis ekosistem; peningkatan data & statistik perikanan tangkap	Selaras dengan Renstra KKP (Program Pengelolaan Sumber Daya Ikan) & prioritas provinsi untuk perairan umum daratan
2	Pengembangan budidaya berdaya saing dan ramah lingkungan	Penguatan sektor unggulan daerah berbasis sumber daya lokal	Peningkatan kualitas benih & pakan; penerapan teknologi ramah lingkungan; penguatan akses modal & pasar pembudidaya	Sejalan dengan agenda ketahanan pangan nasional & prioritas Kaltim untuk budidaya air tawar & payau
3	Industrialisasi perikanan & peningkatan nilai tambah	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah	Modernisasi unit pengolahan ikan; penerapan sertifikasi mutu & higienitas; penguatan branding & promosi produk lokal	Konsisten dengan hilirisasi perikanan dalam Renstra KKP & penguatan produk unggulan daerah di RPJMD
4	Modernisasi sarana prasarana perikanan (TPI, rantai dingin)	Peningkatan sarana prasarana pendukung ekonomi produktif	Revitalisasi & optimalisasi TPI; pembangunan cold storage & rantai dingin; peningkatan akses jalan ke sentra produksi	Mendukung arah pembangunan infrastruktur daerah & program rantai dingin nasional
5	Pemberdayaan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha	Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran kelembagaan lokal	Penguatan kelembagaan (KUB, Pokdakan, koperasi); peningkatan literasi digital; pendampingan & pelatihan kewirausahaan	Sejalan dengan Renstra KKP (Program Pemberdayaan Nelayan Kecil) & penguatan kelembagaan masyarakat di Kaltim

6	Penguatan SDM aparatur & sistem data perikanan	Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan	Penambahan & peningkatan kapasitas penyuluh; penguatan sistem informasi & integrasi data (Satu Data); peningkatan Monev berbasis data	Sinkron dengan agenda reformasi birokrasi & digitalisasi data sektoral provinsi
7	Pengendalian degradasi lingkungan & adaptasi iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim	Pengendalian pencemaran perairan; rehabilitasi ekosistem; integrasi adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan perikanan	Mendukung SDGs 13 & Renstra KKP terkait mitigasi dampak perubahan iklim
8	Integrasi pembangunan perikanan dengan pembangunan wilayah (IKN)	Integrasi pembangunan daerah dengan pembangunan IKN & konektivitas wilayah	Integrasi program perikanan dengan pembangunan IKN; sinkronisasi lintas sektor; penguatan kerjasama antar daerah mendukung ketahanan pangan IKN	Selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan prioritas Kaltim dalam mendukung pembangunan IKN

Tabel 3.4, menunjukkan keselarasan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dengan NSPK Kementerian Kelautan dan Perikanan, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2025–2029, serta prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Setiap isu strategis perangkat daerah diturunkan menjadi arah kebijakan operasional yang spesifik, namun tetap menjaga konsistensi dengan kerangka pembangunan daerah, provinsi, nasional, dan agenda global (SDGs dan *Blue Economy*). Dengan demikian, arah kebijakan Renstra PD ini tidak hanya menjawab tantangan sektoral, tetapi juga mendukung pencapaian visi-misi kepala daerah serta target pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERIKANAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan 2025–2030

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2030 disusun sebagai hasil *cascading* dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Bab III. Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, serta sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029.

Setiap program yang dirumuskan merupakan instrumen strategis untuk mencapai outcome yang telah ditetapkan, sementara kegiatan dan sub kegiatan merupakan instrumen operasional dalam mewujudkan output sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kewenangan Dinas Perikanan. Dengan demikian, keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tetap terjaga secara sistematis.

Lebih lanjut, program dan kegiatan yang disusun mengacu pada nomenklatur resmi sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, substantif, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk periode 2025–2029 memuat berbagai upaya pengembangan sektor perikanan, mulai dari peningkatan produksi tangkap dan budidaya, penguatan pengolahan dan pemasaran, pengawasan dan konservasi, peningkatan konsumsi ikan masyarakat, hingga penguatan tata kelola dan sinergi lintas sektor. Sementara

itu, program dan kegiatan tahun 2030 dinyatakan secara eksplisit sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2030. Gambaran terkait program rumusan program/kegiatan /sub kegiatan tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Dinas Perikanan, Kabupaten Kutai barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan							
- Meningkatnya Pembangunan dan Diversifikasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Perikanan	Meningkatnya Produktivitas Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Yang Tersusun	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)		
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
					Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.25.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.25.01.2.02.0006 - Pengolahan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.25.01.2.03 - Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.25.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aliran Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surt Menyurat (Laporan)	3.25.01.2.00 - Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surt Menyurat (Laporan)	3.25.01.2.00.0001 - Penyediaan Jasa Surt Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.00.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3.25.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.00.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.00.0006 - Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Produk Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Cakupan Nelayan yang Terbina	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Diformalisasi, Pembentukan dan Pengembangan Kelompoknya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyuluhan Bantuan Perencanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kemitraan (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemitraan Nelayan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyuluhan Bantuan Perencanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Perencanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				Persentase Tahapan Pembangunan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	3.25.03.2.03.0001 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Tersedia	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan lengkap yang tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dikuasakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0003 - Penetapan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
					Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0004 - Penetapan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	
					Jumlah data dan informasi perikanan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.04.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	
				Jumlah Kapal yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Kapal Dibawah 10 GT yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyerahan dan Prosedur Penetapan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.03.2.06 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKIP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.06 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyerahan dan Prosedur Penetapan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.03.2.06.0001 - Penetapan Penyerahan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	
					Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKIP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.06.0003 - Penetapan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKIP)	
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELUARAN PERIKANAN BUDIDAYA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Rekomendasi Pembudidaya yang Mendapatkan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sedemana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diberikannya (Rekomendasi)	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diberikannya (rekomendasi)	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sedemana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Penyerapan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	3.25.04.2.01.0001 - Penetapan Penyerapan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Benuasaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diberikan (Rekomendasi)	3.25.04.2.01.0002 - Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Model Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
					Jumlah Rekomendasi Teknik Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kawasan Perikanan Kabupaten Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Teknik Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kawasan Perikanan Kabupaten Kota	
					Jumlah Rekomendasi Penyerapan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kawanan Kabupaten/Kota yang Diberikannya (rekomendasi)	3.25.04.2.01.0004 - Penerbitan Rekomendasi Penyerapan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kawasan Perikanan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kadi yang terbitas	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kadi yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kalamibagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pembudayaan Pembudidaya Ikan Kadi	
					Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kadi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pembudayaan Pembudidaya Ikan Kadi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUT-COME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Jumlah Rekomendasi Pembudidaya yang Mendapatkan Pemberitaan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.03 - Pemberitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (Rekomendasi)	3.25.04.2.03 - Pemberitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (Rekomendasi)	3.25.04.2.03.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (Rekomendasi)	3.25.04.2.03.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.03.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	3.25.04.2.03.0003 - Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan jumlah bend yang dihasilkan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Usulan Dokumen Pemantauan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Mutasi Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Menerima Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Mutasi Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembiayaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembiayaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan dan Pengembangan Pemantauan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Uraian Dokumen Pemantauan dan Perindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Perindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang berwujud	Kawasan konservasi daerah yang operasional (Ha)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pelaku usaha perikanan hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lahirnya yang Dapat Disusutkan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperoleh kebutuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lahirnya yang Dapat Disusutkan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lahirnya yang Dapat Disusutkan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lahirnya yang Dapat Disusutkan Dalam Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diberikan keputuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Jumlah unit usaha mikro dan kecil yang terdaftar	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	3.25.06.2.01 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Penetapan Peraturan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Sunk dan Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemecotan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Penen Pengolahan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Perizinan Berusaha Pemecotan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Penen Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemecotan Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemecotan Hasil Perikanan	
					Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemecotan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0004 - Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemecotan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemecotan dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemecotan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Jumlah POKLAHSAR yang terbit	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemecotan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemecotan Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemecotan Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemecotan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemecotan Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemecotan Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Jumlah Ton Ikan yang tersedia untuk industri pengolahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terdaftar (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Pengadaan dan Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03 - Petyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tertaslitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.2. Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Tahun 2025–2029

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta sasaran strategis pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat telah merumuskan indikator kinerja utama dari setiap program yang akan dilaksanakan selama periode 2025–2029. Penentuan indikator ini diselaraskan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya keterukuran, akuntabilitas, dan keterpaduan antara outcome program dengan target pembangunan daerah.

Setiap indikator program dirancang untuk memberikan gambaran kinerja yang konkrit terhadap hasil yang ingin dicapai, baik dari sisi peningkatan produktivitas sektor perikanan, peningkatan kualitas layanan publik, maupun penguatan kelembagaan dan tata kelola. Target kinerja ditetapkan secara bertahap dan realistis, mempertimbangkan baseline kinerja lima tahun sebelumnya, kapasitas fiskal daerah, serta potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tersedia.

Adapun pagu indikatif yang dialokasikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan mencerminkan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan masing-masing program secara optimal. Estimasi pagu ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan riil, proyeksi inflasi, serta arah kebijakan penganggaran daerah yang efisien dan berbasis kinerja.

Secara umum, alokasi anggaran terbesar diarahkan pada program yang bersifat produktif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, seperti Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Di sisi lain, program-program pendukung seperti Penguatan Tata Kelola dan Sistem Informasi serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga mendapatkan alokasi proporsional untuk memastikan tercapainya keberlanjutan pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 seperti yang tertuang dalam Tabel 4.2, memuat daftar indikatif rencana

program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya untuk periode perencanaan tahun 2025 hingga 2030. Tabel ini menjadi acuan penting dalam memastikan konsistensi antara arah kebijakan strategis, pelaksanaan program, serta efisiensi penggunaan sumber daya anggaran daerah.

Program-program yang direncanakan telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis. Fokus utama diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap, pemberdayaan pelaku utama, peningkatan nilai tambah produk, pengawasan sumber daya ikan, serta penguatan sistem data dan informasi perikanan.

Masing-masing program disertai indikator dan target kinerja yang bersifat kuantitatif dan terukur, seperti volume produksi, jumlah kelompok difasilitasi, frekuensi kegiatan pengawasan, hingga jumlah data statistik yang diperbarui. Target-target ini dirancang secara bertahap dan realistis dalam jangka waktu enam tahun, mencerminkan pendekatan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dari sisi anggaran, pagu indikatif disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan ril operasional, kemampuan fiskal daerah, serta estimasi biaya standar output kegiatan. Total akumulasi kebutuhan pendanaan untuk seluruh program selama periode 2025–2030 menjadi referensi dalam penyusunan Renja tahunan, RKPD, dan dokumen penganggaran lainnya.

Substansi dari Tabel 4.2 juga mencerminkan penerapan prinsip integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), di mana capaian indikator program menjadi dasar dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, Indikasi Rencana Program Prioritas tidak hanya menjadi daftar program prioritas saja, melainkan juga merupakan instrumen perencanaan strategis yang menghubungkan antara perencanaan jangka menengah daerah, penganggaran tahunan, dan capaian kinerja OPD yang terukur.

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat

REKAM URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BERKUALITAS DAN PERKAMAN				14.300.147.800		26.001.147.800		38.531.897.300		50.808.187.800		61.357.747.300		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KUALITAS/KEKADUKAN				14.300.147.800		14.400.147.800		14.500.147.800		15.200.147.800		15.000.147.800		
Merencanakan SAKOT Perangkat Daerah	Nies-SAKOT Perangkat Daerah (Angka)	67,07	68,07	13.740.641.300	68,57	14.120.841.300	69,07	14.500.841.300	69,57	14.880.841.300	70,07	15.260.841.300	3.25.01.001.001.01.00 - Direct Disbursement	
3.25.01.001 - Peningkatan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.000.000		120.000.000		125.000.000		131.000.000		137.000.000		
Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kinerja yang Terselesaikan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Aksi realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	105.000.000	3	120.000.000	3	125.000.000	3	131.000.000	3	137.000.000		
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6		6		6		7					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	12		12		12		12					
3.25.01.2.01.001 - Peningkatan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah				50.000.000		60.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Terselesaikan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6	50.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	65.000.000	7	70.000.000		
3.25.01.2.01.002 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		7.000.000		
Terselesaikan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Aksi realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	7.000.000		
3.25.01.2.01.003 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		60.000.000		67.000.000		68.000.000		80.000.000		
Terselesaikan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	12	50.000.000	12	60.000.000	12	67.000.000	12	68.000.000	12	80.000.000		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.185.701.300		9.208.201.300		9.384.201.300		9.704.201.300		10.052.701.300		
Cakupan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	9.185.701.300	1	9.208.201.300	1	9.384.201.300	1	9.704.201.300	1	10.052.701.300		
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kinerja SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12					

H a | 108 | 140

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.28.01.2.08.0011 - Bidang Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		80.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terkait sebanyak Bidang Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Prosedur Perundang-Undangan (Orang)	3	4	80.000.000	4	80.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000		
3.25.01.2.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				811.300.000		843.800.000		854.300.000		874.800.000		890.300.000		
Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan (Paket)	2	2	811.300.000	2	843.800.000	2	854.300.000	2	874.800.000	2	890.300.000		
	Jumlah Paket Perbaikan dan Penggantian Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tinggal yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BOPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.25.01.2.08.0000 - Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor				200.000.000		200.000.000		210.000.000		240.000.000		250.000.000		
Tersedia layanan Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	210.000.000	2	240.000.000	2	250.000.000		
3.28.01.2.08.0000 - Penyediaan Perbaikan Rumah Tinggal				8.300.000		8.300.000		8.300.000		8.300.000		8.300.000		
Tersedia layanan Perbaikan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tinggal yang Disediakan (Paket)	1	1	8.300.000	1	8.300.000	1	8.300.000	1	8.300.000	1	8.300.000		
3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		155.000.000		155.000.000		160.000.000		160.000.000		
Tersedia layanan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	150.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000		
3.28.01.2.08.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman				0.000.000		0.000.000		0.000.000		0.000.000		7.000.000		
Tersedia layanan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan (Paket)	2	2	0.000.000	2	0.000.000	2	0.000.000	2	0.000.000	2	7.000.000		
3.25.01.2.08.0006 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BOPD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terkait sebanyak Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BOPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BOPD (Laporan)	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
3.25.01.2.08 - Penyelenggaraan Jasa Perangkat Umum Pemerintah Daerah				3.600.000.000		3.960.000.000		4.100.000.000		4.100.000.000		4.100.000.000		
Cakupan Layanan Penyelenggaraan Jasa Perangkat Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Hukum, Sosial, Budaya, dan Lain-lain yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.600.000.000	1	3.960.000.000	1	4.100.000.000	1	4.100.000.000	1	4.100.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Buat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelaporan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.28.01.2.08.0001 - Penyelenggaraan Jasa Buat Menyurat				0.000.000		0.000.000		0.000.000		0.000.000		7.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tatakelola Penyediaan Jasa Sunk Marjunt	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sunk Marjunt (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000		
3.25.81.2.01.001 - Penyelenggaraan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Lahan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya jasa konsultasi, Sumber Daya Air dan Lahan yang disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Lahan yang disediakan (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
3.25.81.2.01.002 - Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Urus Kanker				3.500.000.000		3.800.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.300.000.000		
Tersedianya jasa pelayanan urus kanker yang disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kanker yang disediakan (Laporan)	12	12	3.500.000.000	12	3.800.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.300.000.000		
3.25.81.2.02 - Penyelenggaraan Bina Muka Daerah Penyelenggara Urus Perencanaan Daerah				101.040.000		102.040.000		102.040.000		102.040.000		102.040.000		
Layanan Layanan Perencanaan Bina Muka Daerah Penyelenggara Urus Perencanaan Daerah	Jumlah Perencanaan dan Bina Muka Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	101.040.000	10	102.040.000	10	102.040.000	10	102.040.000	10	102.040.000		
	Jumlah Rencana dan Perencanaan Perencanaan Daerah yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Rencana dan Perencanaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Perencanaan Dinas atau Kantor Dinas Kabupaten yang Disediakan dan Disediakan Pajal dan Perencanaan (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Rencana Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Disediakan Pajal dan Perencanaan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Rencana Dinas dan Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.25.81.2.03.001 - Penyelenggaraan Jasa Perencanaan, Bina Perencanaan, dan Pajal Perencanaan Penyelenggara Dinas atau Kantor Dinas Kabupaten				10.000.000		11.000.000		11.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya jasa perencanaan, Bina Perencanaan dan Pajal Perencanaan Penyelenggara Dinas atau Kantor Dinas Kabupaten	Jumlah Rencana Perencanaan Dinas atau Kantor Dinas Kabupaten yang Disediakan (Unit)	10	10	10.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000		
3.25.81.2.03.002 - Penyelenggaraan Jasa Perencanaan, Bina Perencanaan, Pajal dan Perencanaan Kantor Dinas Operasional atau Lapangan				27.940.000		27.940.000		27.940.000		27.940.000		27.940.000		
Tersedianya jasa perencanaan, Bina Perencanaan, Pajal dan Perencanaan Kantor Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Rencana Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Disediakan Pajal dan Perencanaan (Unit)	3	3	27.940.000	3	27.940.000	3	27.940.000	3	27.940.000	3	27.940.000		
3.25.81.2.03.003 - Penyelenggaraan Perencanaan dan Bina Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tatakelola Perencanaan Perencanaan dan Bina Lainnya	Jumlah Perencanaan dan Bina Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT (DAERAH)	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01.2.04.0009 - Pondokkan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tertataletannya Pondokkan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Juta)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
3.25.01.2.04.0010 - Pondokkan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tertataletannya Pondokkan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Juta)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
3.25.01.2.04.0011 - Pondokkan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.280.000		20.280.000		20.280.000		20.280.000		20.280.000		
Tertataletannya Pondokkan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Juta)	16	16	20.280.000	16	20.280.000	16	20.280.000	16	20.280.000	16	20.280.000		
Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Misi SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	87,87	88,07	262.506.620	88,57	272.806.620	89,07	282.806.620	89,57	292.806.620	90,07	302.806.620	3.25.0.000.000.01.00 01 - UPTD (Buku Berkas 1000) Misi	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.000.000		40.000.000		43.000.000		46.000.000		49.000.000		
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	3	37.000.000	3	40.000.000	3	43.000.000	3	46.000.000	3	49.000.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
3.25.01.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000		
Tertataletannya Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	7.000.000		
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.500.000		30.000.000		37.000.000		40.000.000		48.000.000		
Tertataletannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	12	32.500.000	12	30.000.000	12	37.000.000	12	40.000.000	12	48.000.000		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akte Tetap SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Balasane Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Balasane Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		
Terdapatnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000		
3.25.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balasane Triwulan/ Semesteran SKPD				5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		
Terdapatnya Laporan Keuangan Balasane Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Balasane Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Balasane Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Balasane Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	12	7.000.000		
3.25.01.2.03 - Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah				0		0		0		18.000.000		19.500.000		
Terdapatnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	2	18.000.000	2	19.500.000		
3.25.01.2.03.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				0		0		0		18.000.000		19.500.000		
Terdapatnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	2	18.000.000	2	19.500.000		
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				126.000.000		136.706.620		147.006.000		153.756.620		160.006.000		
Gedipin Unsur Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	126.000.000	2	136.706.620	2	147.006.000	2	153.756.620	2	160.006.000		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komitansi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tinggal yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.2.06.0002 - Pemeliharaan Perawatan dan Pengkayaan Kantor				60.000.000		61.800.000		62.000.000		63.000.000		64.000.000		
Terdapatnya Perawatan dan Pengkayaan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Perawatan dan Pengkayaan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	60.000.000	2	61.800.000	2	62.000.000	2	63.000.000	2	64.000.000		
3.25.01.2.06.0003 - Pemeliharaan Perawatan Rumah Tinggal				6.000.000		6.250.000		6.500.000		6.750.000		7.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terdapatnya Pemasaran Komoditas Target yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Pemasaran Komoditas Target yang Disediakan (Paket)	1	1	8.000.000	1	8.200.000	1	8.000.000	1	8.700.000	1	7.000.000		
3.25.01.2.00.0001 - Pemasaran Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		42.000.000		
Terdapatnya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	42.000.000		
3.25.01.2.00.0002 - Pemasaran Barang Coklat dan Pengemasan				5.000.000		5.500.000		5.000.000		5.500.000		7.000.000		
Terdapatnya Gasing Gasing dan Pengemasan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Gasing dan Pengemasan yang Disediakan (Paket)	2	2	5.000.000	2	5.500.000	2	5.000.000	2	5.500.000	2	7.000.000		
3.25.01.2.00.0003 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD				50.000.000		57.000.000		65.000.000		67.000.000		90.000.000		
Terdapatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD (Laporan)	12	12	35.000.000	12	37.500.000	12	45.000.000	12	47.500.000	12	90.000.000		
3.25.01.2.00 - Pemasaran Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				129.000.000		134.250.000		139.500.000		131.250.000		162.000.000		
Cakupan Layanan Pemasaran Jasa Administrasi Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemasaran Jasa Administrasi Urutan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Laporan)	12	12	129.000.000	12	134.250.000	12	139.500.000	12	131.250.000	12	162.000.000		
	Jumlah Laporan Pemasaran Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pemasaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.25.01.2.00.0001 - Pemasaran Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.250.000		4.500.000		4.750.000		5.000.000		
Terdapatnya Pemasaran Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Pemasaran Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.000.000	1	4.250.000	1	4.500.000	1	4.750.000	1	5.000.000		
3.25.01.2.00.0002 - Pemasaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		46.000.000		50.000.000		51.000.000		52.000.000		
Terdapatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Pemasaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	46.000.000	12	50.000.000	12	51.000.000	12	52.000.000		
3.25.01.2.00.0003 - Pemasaran Jasa Pemukiman Umum Kantor				85.000.000		88.000.000		85.000.000		73.000.000		85.000.000		
Terdapatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Pemasaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	85.000.000	12	88.000.000	12	85.000.000	12	73.000.000	12	85.000.000		
3.25.01.2.00 - Pemasaran Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				50.000.000		58.000.000		50.000.000		58.000.000		50.000.000		
Cakupan Layanan Administrasi Urutan Penunjang Daerah	Jumlah Laporan dan Pemasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Laporan)	1	1	50.000.000	1	58.000.000	1	50.000.000	1	58.000.000	1	50.000.000		
	Jumlah Laporan dan Pemasaran Lainnya yang Disediakan (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan dan Pemasaran Lainnya yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.2.00.0004 - Pemasaran Pemasaran dan Pemasaran				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terdapatnya Pemasaran dan Pemasaran dan Pemasaran	Jumlah Laporan dan Pemasaran dan Pemasaran yang Disediakan (Laporan)	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01.2.01.0110 - Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tetapannya Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirawat (Unit)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
3.25.01.2.01.0111 - Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tetapannya Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirawat (Unit)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
3.25.03 - PROGRAM PENGELUARAN PERIKANAN DAERAH				3.575.000.000		4.075.000.000		4.575.000.000		5.075.000.000		5.575.000.000		
Pengalokasian produk perikanan tangkap				0		0		0		0		0		3.25.03.03.03.01.01 01 - UPED: Baku Swadaya (SD) Masyarakat
Terdapatnya Tata Kelola Keluaran dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.802	1.702	3.575.000.000	1.752	4.075.000.000	1.802	4.575.000.000	1.852	5.075.000.000	1.902	5.575.000.000		3.25.03.03.03.01.01 02 - Dinas Perikanan
3.25.03.2.01 - Penguatan Peningkatan Rona di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Perairan Air Lainnya yang Dapat Dikelola dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota				1.260.000.000		1.428.000.000		1.596.000.000		1.764.000.000		1.932.000.000		
Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Rasi di Perairan Dalam dan Sela Kabupaten/Kota yang Tersedia (Colokan)	5	5	1.260.000.000	5	1.428.000.000	5	1.596.000.000	5	1.764.000.000	5	1.932.000.000		
	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia dan Tersedia (Unit)	33	38		36		38		36		38			
	Jumlah Perikanan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	312	34		38		42		36		38			
3.25.03.2.01.0301 - Penguatan Data dan Informasi Sumber Daya Rasi dan Perikanan Dalam dan Sela Kabupaten Kota				200.000.000		228.000.000		256.000.000		284.000.000		312.000.000		
Terdapatnya Data dan Informasi Sumber Daya Rasi dan Perikanan Dalam dan Sela Kabupaten/Kota yang Tersedia (Colokan)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Rasi dan Perikanan Dalam dan Sela Kabupaten/Kota yang Tersedia (Colokan)	6	6	200.000.000	6	228.000.000	6	256.000.000	6	284.000.000	6	312.000.000		
3.25.03.2.01.0302 - Penguatan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				800.000.000		1.028.000.000		1.184.000.000		1.340.000.000		1.520.000.000		
Terdapatnya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	312	34	800.000.000	38	1.028.000.000	42	1.184.000.000	36	1.340.000.000	38	1.520.000.000		
3.25.03.2.01.0303 - Penguatan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				300.000.000		336.000.000		372.000.000		408.000.000		444.000.000		
Terdapatnya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia dan Tersedia (Unit)	33	38	300.000.000	36	336.000.000	38	372.000.000	36	408.000.000	38	444.000.000		
3.25.03.2.02 - Penguatan Kapasitas dan Kualitas Perikanan Kutai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.365.000.000		1.596.000.000		1.764.000.000		1.932.000.000		2.100.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cakupan Nelayan yang Terbiasa	Jumlah Unit Usaha yang Dikembangkan Prinsipnya Sani dan Perikanan Berkas Perikanan, Kemitraan Usaha (UKU)	4	4	1.201.200.000	6	1.198.300.000	8	1.340.000.000	8	1.400.000.000	8	1.400.000.000		
	Jumlah Nelayan Kaki yang Mengikuti Kapasitasnya (Orang)	13	13		10		13		10		10			
	Jumlah Kelompok Nelayan Kaki yang Dikembangkan Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya (Kelompok)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	4	4		5		5		5		5			
3.25.03.2.03.001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				351.250.000		308.350.000		448.350.000		427.350.000		545.350.000		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kaki	Jumlah Nelayan Kaki yang Mengikuti Kapasitasnya (Orang)	13	13	351.250.000	10	308.350.000	13	448.350.000	10	427.350.000	10	545.350.000		
3.25.03.2.03.002 - Peningkatan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya Nelayan Kecil				200.000.000		228.200.000		250.200.000		204.200.000		312.200.000		
Tetapaknya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kaki yang Dikembangkan Pembentukan dan Pengembangan Kemitraannya (Kelompok)	4	4	200.000.000	4	228.200.000	4	250.200.000	4	204.200.000	4	312.200.000		
3.25.03.2.03.003 - Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Usaha Nelayan Skala Kecil				200.000.000		228.200.000		250.200.000		204.200.000		312.200.000		
Tetapaknya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Dikembangkan Prinsipnya Sani dan Perikanan Berkas Perikanan, Kemitraan Usaha (UKU)	4	4	300.000.000	5	228.200.000	5	250.200.000	5	204.200.000	5	312.200.000		
3.25.03.2.03.004 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Usaha Nelayan Skala Kecil				300.000.000		342.300.000		384.300.000		426.300.000		468.300.000		
Terdapatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	4	4	300.000.000	5	342.300.000	5	384.300.000	5	426.300.000	5	468.300.000		
3.25.03.2.03 - Peningkatan dan Pengembangan Tempat Pelanggaran Ikan (TPI)				800.750.000		1.076.750.000		1.180.750.000		1.208.750.000		1.380.750.000		
Peningkatan Cakupan Peningkatan	Jumlah Layanan dalam rangka Peningkatan Tempat Pelanggaran Ikan (TPI) (Layanan)	1	1	800.750.000	1	1.076.750.000	1	1.180.750.000	1	1.208.750.000	1	1.380.750.000		
	Jumlah SOP Peningkatan dan Pengembangan Tempat Pelanggaran Ikan (TPI) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.25.03.2.03.001 - Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Tempat Pelanggaran Ikan (TPI)				800.750.000		1.076.750.000		1.180.000.000		1.208.000.000		1.380.000.000		
Ditutupinya SOP Peningkatan dan Pengembangan Tempat Pelanggaran Ikan (TPI)	Jumlah SOP Peningkatan dan Pengembangan Tempat Pelanggaran Ikan (TPI) (Dokumen)	0	1	800.750.000	1	1.076.750.000	1	1.180.000.000	1	1.208.000.000	1	1.380.000.000		
3.25.03.2.03.002 - Peningkatan Pengawasan Tempat Pelanggaran Ikan (TPI)				0		16.750.000		40.750.000		68.750.000		80.750.000		
Terdapatnya Layanan Peningkatan Tempat Pelanggaran Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Peningkatan Tempat Pelanggaran Ikan (TPI) (Layanan)	1	1	0	1	16.750.000	1	40.750.000	1	68.750.000	1	80.750.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03.2.94 - Penyaluran Tenda Dapur Kulak Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Dangkal, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dikeluarkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Tersedia	Jumlah data dan informasi pemilikan usaha perikanan tangkap yang beresada (Dokumen)	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
	Jumlah rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dibuktikan (Rekomendasi)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah rekomendasi lain usaha yang dibuktikan (Rekomendasi)	0	1		1		1		1		1			
3.25.03.2.94.0003 - Penerbitan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Dibuktikannya rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dibuktikan (Rekomendasi)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.25.03.2.94.0004 - Penerbitan rekomendasi usaha perikanan tangkap				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Dibuktikannya rekomendasi lain usaha perikanan tangkap	Jumlah rekomendasi lain usaha yang dibuktikan (Rekomendasi)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.25.03.2.94.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi pemilikan usaha perikanan tangkap yang beresada (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
3.25.03.2.95 - Pendistribusian Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bersampai di Sungai, Dangkal, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dikeluarkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Jumlah Kapal yang Mendapatkan Rekomendasi Ijin Kapal Otomatis 10 GT yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Dibuktikan (Rekomendasi)	0	1		1		1		1		1			
3.25.03.2.95.0001 - Penerbitan Penyelesaian dan Prosedur Pendistribusian Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Dibuktikannya Penyelesaian dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
3.25.03.2.95.0002 - Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Dibuktikannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Dibuktikan (Rekomendasi)	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04 - PROGRAM PENGELUARAN PERIKANAN BUDIDAYA				5.907.000.000		6.231.800.000		7.275.750.000		7.543.000.000		7.670.000.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.800	3.000	5.907.000.000	3.200	6.851.800.000	3.400	8.790.750.000	3.600	9.342.000.000	3.800	9.990.000.000	3.26.3.00.3.00.01.00 00 - Dinas Perikanan	
3.25.04.2.01 - Peningkatan dan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuh dari Sistem 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				258.000.000		294.100.000		314.000.000		347.100.000		365.400.000		
Jumlah Rekomendasi Pembudidayaan yang Mendapatkan Perhatian Terdiri Dokter Ikan, Pembudidayaan Ikan Kecil (IDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penyusunan dan Prosedur Peningkatan dan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Morfasi atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	0	30	258.000.000	30	294.100.000	40	314.000.000	45	347.100.000	50	365.400.000		
	Jumlah Rekomendasi Penyusunan dan Prosedur Peningkatan dan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Morfasi atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	0	30		30		40		45		50			
	Jumlah Rekomendasi Terdiri dari Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Mempertahankan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	0	30		30		40		45		50			
	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Morfasi atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diperlukan (Rekomendasi)	0	30		30		40		45		50			
3.25.04.2.01.001 - Peningkatan Peningkatan dan Prosedur Peningkatan dan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau, Morfasi atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				75.000.000		85.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

SEKANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KESATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dikembangkan Rekomendasi Penyediaan dan Prosedur Perencanaan Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Penyediaan dan Prosedur Perencanaan Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	0	30	75.000.000	30	85.800.000	40	100.000.000	40	118.000.000	50	110.000.000		
3.25.04.2.01.0002 - Penyediaan Perencanaan Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				100.000.000		145.100.000		150.000.000		167.100.000		180.000.000		
Terdapatnya Perencanaan Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Perencanaan Rekomendasi Teknik	Jumlah Rekomendasi Perencanaan Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Utuhnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	30	100.000.000	30	145.100.000	40	150.000.000	40	167.100.000	50	180.000.000		
3.25.04.2.01.0003 - Perencanaan Rekomendasi Teknik Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Menjadi Kemandirian Kabupaten/Kota				55.000.000		27.800.000		26.600.000		26.000.000		30.000.000		
Dikembangkan Rekomendasi Teknik Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Menjadi Kemandirian Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknik Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Menjadi Kemandirian Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	0	30	55.000.000	30	27.800.000	40	26.600.000	40	26.000.000	50	30.000.000		
3.25.04.2.01.0004 - Perencanaan Rekomendasi Penyediaan dan Prosedur Perencanaan Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Menjadi Kemandirian Kabupaten/Kota				20.000.000		27.800.000		23.000.000		26.000.000		30.000.000		
Dikembangkan Rekomendasi Penyediaan dan Prosedur Perencanaan Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Menjadi Kemandirian Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penyediaan dan Prosedur Perencanaan Unit Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Ikan yang Menjadi Kemandirian Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	0	30	20.000.000	30	27.800.000	40	23.000.000	40	26.000.000	50	30.000.000		
3.25.04.2.02 - Peningkatan Pendapatan Daya Ikan Negeri				1.101.750.000		1.328.750.000		1.470.000.000		1.826.000.000		1.642.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	1	5	1.161.750.000	5	1.326.753.080	7	1.470.000.000	8	1.605.500.000	10	1.642.000.000		
	Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	1	10		11		12		13		14			
	Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	4	18		11		12		13		14			
	Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	5	2		6		7		8		9			
3.25.04.2.02.9.001 - Pengembangan Kapasitas Pembiayaan Daya Ikan Kecil				400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		
Tetapaknya Pengembangan Kapasitas Pembiayaan Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	1	10	800.000.000	11	900.000.000	12	980.000.000	13	1050.000.000	14	1090.000.000		
3.25.04.2.02.9.002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Kemitraan Pembiayaan Daya Ikan Kecil				75.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		130.000.000		
Tetapaknya Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Kemitraan Pembiayaan Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	6	8	75.000.000	9	80.000.000	7	80.000.000	8	100.000.000	9	130.000.000		
3.25.04.2.02.9.003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				75.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		130.000.000		
Tetapaknya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	1	5	75.000.000	5	80.000.000	7	90.000.000	8	100.000.000	10	130.000.000		
3.25.04.2.02.9.004 - Peningkatan Pendampingan, Penyaluran Akses Bina Penghasilan, Teknologi dan Informasi, Serta Peningkatan Pendapatan dan Peluasan				861.750.000		116.753.080		790.000.000		805.500.000		871.000.000		
Tetapaknya Pendampingan, Penyaluran Akses Bina Penghasilan, Teknologi dan Informasi, Serta Peningkatan Pendapatan dan Peluasan	Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	4	18	861.750.000	11	116.753.080	12	790.000.000	13	805.500.000	14	871.000.000		
3.25.04.2.03 - Peningkatan Tawar Lagi Pembiayaan Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.040.000		110.800.000		125.640.000		138.840.000		150.200.000		
Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	Jumlah Kelompok Usaha yang berkualitas Sektoral Perikanan, Berkas Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	0	26	100.040.000	25	110.800.000	50	125.640.000	55	138.840.000	70	150.200.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rekomendasi Penyusunan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Perindustri/layanan Ikan Hutan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Disiapkan (Rekomendasi)	80	80		80		80		80		70			
3.25.04.2.03.001.1 - Peningkatan Penyelesaian dan Prosedur Perizinan Tanda Daftar bagi Perindustri/layanan Ikan Kecil (TDPRK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				43.348.300		50.000.000		55.040.000		50.040.000		60.040.000		
Dianutkannya Rekomendasi Penyusunan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Perindustri/layanan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Disiapkan (Rekomendasi)		80	80	43.348.300	80	50.000.000	80	55.040.000	80	50.040.000	70	60.040.000		
3.25.04.2.03.002 - Pelayan Perizinan Tanda Daftar bagi Pemilik Dayan Ikan Kecil (TDPRK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		31.500.000		35.000.000		30.000.000		38.000.000		
Terselenggaranya Penyelesaian Perizinan Berusaha bagi Pemilik Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		80	80	30.000.000	55	31.500.000	80	35.000.000	65	30.000.000	70	38.000.000		
3.25.04.2.03.003 - Pelayan Perizinan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pemilik Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		31.500.000		35.000.000		30.000.000		38.000.000		
Terselenggaranya Penyelesaian Perizinan Berusaha bagi Pemilik Dayan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		0	80	30.000.000	55	31.500.000	80	35.000.000	65	30.000.000	70	38.000.000		
3.25.04.2.04 - Peningkatan Perindustri/layanan Ikan				3.013.000.000		3.004.440.000		4.790.000.000		4.620.000.000		4.808.240.000		
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan layak untuk yang diadatkan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring/kegiatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	3.013.000.000	1	3.004.440.000	1	4.790.000.000	1	4.620.000.000	1	4.808.240.000		
	Jumlah Usulan Dokumen Perizinan dan Perizinan Lahan Perindustri/layanan Ikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit/Unit usaha Perindustri/layanan Ikan yang memanfaatkan Air untuk Perindustri/layanan Ikan (Unit)	0	1		1		2		2		2			
	Jumlah Sarana Perindustri/layanan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	100	100		105		100		105		105			
	Jumlah Data dan Informasi Perindustri/layanan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perindustri/layanan yang Menerima Perizinan dan Pemasangan Perindustri/layanan Ikan di Darat (Unit)	0	10		10		20		20		20			

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

RUMAH URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terpapar Melalui Pengabdian Kelembagaan Ikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.25.04.2.04.0011 - Penyelenggaraan dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		70.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	70.000.000		
3.25.04.2.04.0012 - Penyelenggaraan Kelembagaan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		110.000.000		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terpapar Melalui Pengabdian Kelembagaan Ikan (Dokumen)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terpapar Melalui Pengabdian Kelembagaan Ikan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	1	110.000.000		
3.25.04.2.04.0013 - Monitoring Kelembagaan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				52.000.000		57.000.000		62.000.000		67.000.000		60.000.000		
Tersedianya Kelembagaan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pemantauan monitoring kelembagaan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	52.000.000	1	57.000.000	1	62.000.000	1	67.000.000	1	60.000.000		
3.25.04.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Sistem Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.201.000.000		3.522.440.000		4.318.960.000		4.318.960.000		4.320.240.000		
Tersedianya Sistem Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	900	100	3.201.000.000	100	3.522.440.000	100	4.318.960.000	100	4.318.960.000	170	4.320.240.000		
3.25.04.2.04.0015 - Peningkatan dan Pemertanian Pembudidayaan Ikan di Darat				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		60.000.000		
Terdapatnya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Meningkatkan Pemertanian dan Pemertanian Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	0	10	50.000.000	10	55.000.000	20	60.000.000	20	65.000.000	30	60.000.000		
3.25.04.2.04.0016 - Rencanana dan Pengembangan Pemertanian Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		80.000.000		
Terdapatnya Rencanana dan Pengembangan Pemertanian Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Meningkatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	0	1	70.000.000	1	75.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	80.000.000		
3.25.04.2.04.0017 - Rencanana, Pengembangan, Pemertanian dan Perikanan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		90.000.000		
Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Rencanana, Pengembangan, Pemertanian dan Perikanan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	Jumlah Usulan Dokumen Pemertanian dan Pengembangan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	0	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	90.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Produk Perikanan Budidaya	Produk Perikanan Budidaya (Ton)	2.800	3.800	500.000.000	3.200	800.000.000	3.400	575.000.000	3.800	900.000.000	3.000	850.000.000	5,25.0.000.000.01.00 01 - UPTD. Balai Serah Rasi (BR) Mentawai	
3.25.04.2.04 - Pengalihan Pembudidayaan Ikan				800.000.000		850.000.000		575.000.000		900.000.000		850.000.000		
Meningkatnya produksi dan pendapatan kehidupan ikan	Jumlah Sisa Perikanan Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dak)	36.000	200.000	500.000.000	250.000	800.000.000	380.000	675.000.000	300.000	900.000.000	400.000	850.000.000		
3.25.04.2.08.0000 - Penguasaan Ketersediaan Sisa Perikanan Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		800.000.000		575.000.000		900.000.000		850.000.000		
Tersedianya Sisa Perikanan Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sisa Perikanan Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dak)	36.000	200.000	500.000.000	250.000	800.000.000	380.000	675.000.000	300.000	900.000.000	400.000	850.000.000		
3.25.05 - PROGRAM PENGALIHAN SUMBER DAYA MELAUTAN DAN PERIKANAN				500.000.000		800.000.000		575.000.000		900.000.000		850.000.000		
Meningkatnya kegiatan laut dan kehidupan masyarakat nelayan													5,25.0.000.000.01.00 01 - UPTD. Balai Serah Rasi (BR) Mentawai	
Terdapatnya Tata Kelola, Ketersediaan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Ketersediaan konservasi daerah yang operasional (Ha)	-	50	500.000.000	40	850.000.000	70	605.000.000	60	911.000.000	90	872.000.000	5,25.0.000.000.01.00 06 - Dinas Perikanan	
3.25.05.2.01 - Pengembangan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cagar Laut yang Dapat Dikelola Secara Berkelanjutan				500.000.000		850.000.000		605.000.000		911.000.000		872.000.000		
Jumlah Perikanan Ulat Perikanan yang menjadi	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber daya perikanan yang dikelola (orang)	0	3	800.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	3	911.000.000	3	872.000.000		
	Jumlah perikanan ulat perikanan ulat yang dikelola kehidupan masyarakat (Perikanan Ulat)	0	15		20		20		30		30			
	Jumlah perikanan ulat per													

[illegible]

Hal 124 | 140

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah	Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.06.2.03 - Peningkatan dan Pengelolaan Bahan Bakar Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		438.142.858		371.142.858		
Kewirausahaan Ikan	Jumlah Peningkatan Kewirausahaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	5.850	5.750	200.000.000	5.800	200.000.000	5.850	200.000.000	5.900	438.142.858	5.900	371.142.858		
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	2	2		2		2		2		2			
3.25.06.2.03.001 - Peningkatan Kewirausahaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		219.571.429		205.571.429		
Meningkatkan Kewirausahaan dan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kewirausahaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	5.850	5.750	100.000.000	5.800	100.000.000	5.850	100.000.000	5.900	219.571.429	5.900	205.571.429		
3.25.06.2.03.002 - Peningkatan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		219.571.429		205.571.429		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	219.571.429	2	205.571.429		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - PROGRAM PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				852.500.000		922.500.000		967.500.000		1.012.500.000		1.062.500.000		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KODIA				852.500.000		922.500.000		967.500.000		1.012.500.000		1.062.500.000		
Manajemen SAPK Perangkat Daerah	Nilai SAPK Perangkat Daerah (Angka)	67,07	68,07	952.500.000	88,57	1.221.500.000	69,07	1.382.500.000	68,57	1.412.500.000	70,07	1.512.500.000	3.25.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD. Sub- Seksi Ruk. (SRK) Mekong	
3.25.01.2.01 - Pemrosesan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				17.500.000		48.500.000		43.500.000		45.500.000		47.500.000		
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang terwujud	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mitigasi Realisasi Kinerja SAPK dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitigasi Realisasi Kinerja (SKPD Laporan)	2	3	17.500.000	3	48.500.000	3	43.500.000	3	45.500.000	3	47.500.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
3.25.01.3.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitigasi Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Mitigasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitigasi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mitigasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitigasi Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	3	5.000.000	3	5.500.000	3	6.000.000	3	6.500.000	3	7.000.000		
3.25.01.2.01.0001 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.500.000		38.500.000		37.500.000		43.000.000		48.500.000		
Terdokumentasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	12	12.500.000	12	38.500.000	12	37.500.000	12	43.000.000	12	48.500.000		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.000.000		11.800.000		12.000.000		13.000.000		14.900.000		
Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD (Laporan)	13	12	13.000.000	12	11.800.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.900.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.3.02.0001 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terdapatnya Laporan Keuangan Akut Tahun SPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SPPD	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SPPD (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.500.000	1	5.000.000	1	8.500.000	1	7.000.000		
3.26.01.2.02.0007 - Realisasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPPD				1.000.000		1.500.000		5.000.000		8.500.000		7.000.000		
Terdapatnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPPD (Laporan)	12	12	1.000.000	12	1.500.000	12	5.000.000	12	8.500.000	12	7.000.000		
3.26.01.2.03 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		18.000.000		10.000.000		
Terdapatnya Berbagai Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Berbagai Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	10.000.000		
3.26.01.2.03.0011 - Berbagai Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan				0		0		0		18.000.000		10.000.000		
Terdapatnya Berbagai Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Berbagai Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	10.000.000		
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				125.000.000		136.750.000		147.500.000		153.750.000		160.000.000		
Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaporan dan Peringkasan Kerja yang Disediakan (Paket)	2	2	125.000.000	2	136.750.000	2	147.500.000	2	153.750.000	2	160.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Paket Koordinasi dan Komulasi SPPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Pelaporan Rutin dan Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.2.06.0002 - Persiapan Pelaporan dan Peringkasan Kerja				50.000.000		51.500.000		52.000.000		53.000.000		54.000.000		
Terdapatnya Pelaporan dan Peringkasan Kerja	Jumlah Paket Pelaporan dan Peringkasan Kerja yang Disediakan (Paket)	2	2	50.000.000	2	51.500.000	2	52.000.000	2	53.000.000	2	54.000.000		
3.25.01.2.06.0003 - Persiapan Pelaporan Rutin dan Tangga				6.000.000		6.250.000		6.500.000		6.750.000		7.000.000		
Terdapatnya Pelaporan Rutin dan Tangga	Jumlah Paket Pelaporan Rutin dan Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	6.000.000	1	6.250.000	1	6.500.000	1	6.750.000	1	7.000.000		
3.25.01.2.06.0004 - Persiapan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.800.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terdapatnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	20.000.000	2	20.800.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
3.25.01.2.06.0005 - Persiapan Barang Cetak dan Penggandaan				1.000.000		1.500.000		0.000.000		8.500.000		7.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	HETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terdapatnya Bangkai Cebakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Bangkai Cebakan dan Penggunaan yang Didistribukan (Paket)	2	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000		
3.15.01.2.08.0000 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.000.000		37.500.000		45.000.000		47.500.000		60.000.000		
Terkumpulnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	35.000.000	12	37.500.000	12	45.000.000	12	47.000.000	12	55.000.000		
3.15.01.2.08 - Penyelenggaraan Jasa Penjangkauan Usaha Perikanan Daerah				125.000.000		134.250.000		135.500.000		151.250.000		142.000.000		
Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Usaha Perikanan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Koordinasi, Sumber Daya Air dan Lain-lain yang Didistribukan (Laporan)	12	12	129.000.000	12	134.250.000	12	139.500.000	12	151.250.000	12	142.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Usaha/Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.15.01.2.08.0001 - Penyelenggaraan Jasa Sural Menyurat				4.000.000		4.250.000		4.500.000		4.750.000		5.000.000		
Terkumpulnya Penyediaan Jasa Sural Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat (Laporan)	1	1	4.000.000	1	4.250.000	1	4.500.000	1	4.750.000	1	5.000.000		
3.15.01.2.08.0000 - Penyediaan Jasa Koordinasi, Sumber Daya Air dan Lain-lain				40.000.000		45.000.000		50.000.000		51.000.000		52.000.000		
Terdapatnya Jasa Koordinasi, Sumber Daya Air dan Lain-lain	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Koordinasi, Sumber Daya Air dan Lain-lain yang Didistribukan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	51.000.000	12	52.000.000		
3.15.01.3.08.0000 - Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Usaha Kantor				95.000.000		96.000.000		95.000.000		75.000.000		86.000.000		
Terdapatnya Jasa Pelayanan Usaha Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Usaha/Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	95.000.000	12	96.000.000	12	95.000.000	12	75.000.000	12	86.000.000		
3.15.01.2.08 - Penyelenggaraan Bangkai Cebakan dan Penggunaan				60.000.000		55.000.000		50.000.000		60.000.000		55.000.000		
Cakupan Layanan Administrasi Usaha Perikanan Daerah	Jumlah Fasilitas dan Mesin Lainnya yang Didistribukan (Unit)	5	5	60.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000		
	Jumlah Sarana dan Peralatan Perikanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekalkan/Disetor (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekalkan/Disetor (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.15.01.3.08.0000 - Penyelenggaraan Perawatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terkumpulnya Penyelenggaraan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Didistribukan (Unit)	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
3.15.01.3.08.0010 - Penyelenggaraan Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		15.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		
Terkumpulnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekalkan/Disetor (Unit)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000		

Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01.3.05.001 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dijawat/Terhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dijawat/Terhabilitasi (Unit)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				0		0		0		0		0		
Indikatornya produksi perikanan berbasis				0		0		0		0		0		3.25.03.03.03.01.30 01 - UPTD: Kota Baru dan (BB) Merawan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				500.000.000		500.000.000		575.000.000		600.000.000		600.000.000		
Indikatornya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.800	3.000	500.000.000	3.350	600.000.000	3.800	575.000.000	3.800	600.000.000	3.800	600.000.000		3.25.04.03.03.01.30 01 - UPTD: Kota Baru dan (BB) Merawan
3.25.04.2.04 - Pengadaan Pembudidayaan Ikan				500.000.000		500.000.000		575.000.000		600.000.000		600.000.000		
Indikatornya produksi dan pendapatan berbasis ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	35.000	300.000	500.000.000	350.000	600.000.000	380.000	575.000.000	380.000	600.000.000	400.000	600.000.000		
3.25.04.2.04.0006 - Pemasangan Kawatjangan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		500.000.000		575.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tindakannya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	35.000	300.000	500.000.000	350.000	600.000.000	380.000	575.000.000	380.000	600.000.000	400.000	600.000.000		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN BUDIDAYA DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				0		0		0		0		0		
Indikatornya kesehatan ikan dan kelestarian hasil				0		0		0		0		0		3.25.05.03.03.01.30 01 - UPTD: Kota Baru dan (BB) Merawan
3.25.06 - PROGRAM PENGALAMAN DAN PENGAWASAN HASIL PERIKANAN				0		0		0		0		0		
Indikatornya konsumsi ikan dan kelestarian				0		0		0		0		0		3.25.06.03.03.01.30 01 - UPTD: Kota Baru dan (BB) Merawan

Daftar sub kegiatan prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra. Penyusunan ini mempertimbangkan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2025–2029, nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya, serta kebutuhan riil masyarakat perikanan.

Sub kegiatan yang diprioritaskan dipilih berdasarkan kriteria:

1. Memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah, khususnya peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberikan dampak nyata bagi nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha perikanan.
3. Mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan perairan.
4. Mampu memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan sarana prasarana, inovasi teknologi, serta penguatan kelembagaan perikanan.

Gambaran terkait sub kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan

Kabupaten Kutai Barat, dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai barat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan				
1.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	

			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	
3.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	

			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPTD. Balai Benih Ikan (BBI) Mentiwan				
4.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa sub kegiatan prioritas yang ditetapkan, di antaranya:

1. **Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Perikanan**, Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, Dinas Perikanan menetapkan *Program Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Berkelanjutan* dengan fokus pada peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap penegakan hukum perikanan sebagai salah satu program prioritas. Program ini diarahkan untuk memastikan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, melindungi ekosistem perairan, serta meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan patroli rutin, sosialisasi, penguatan kelembagaan pengawas, dan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan tingkat pelanggaran perikanan dapat ditekan dan keberlanjutan usaha perikanan di Kabupaten Kutai Barat dapat terjamin
2. **Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi nelayan kecil, memperbaiki sarana penangkapan, dan mendorong produktivitas sektor perikanan

tangkap. Sub kegiatan ini mendukung prioritas daerah di bidang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi produktif.

3. **Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**, melalui pemberian pendampingan, kemudahan akses iptek, serta pendidikan dan pelatihan. Sub kegiatan ini menjadi prioritas strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi masyarakat, serta penguatan daya saing pembudidaya ikan.
4. **Pengelolaan Pembudidaya Ikan melalui Penjaminan Ketersediaan Sarana**, yang berfokus pada penyediaan sarana produksi seperti benih, pakan, dan teknologi ramah lingkungan. Sub kegiatan ini relevan untuk mendukung produktivitas budidaya, mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal, dan menjamin keberlanjutan produksi perikanan.
5. **Penyediaan Benih Ikan Berkualitas oleh UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Mentiawan**, yang memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan produksi melalui penyediaan benih ikan unggul. BBI Mentiawan diposisikan sebagai pusat layanan teknis perbenihan dan pengembangan teknologi budidaya yang mendukung ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan pembudidaya ikan.

Secara keseluruhan, sub kegiatan prioritas ini menggambarkan komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, dan mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dengan adanya prioritas ini, diharapkan peran sektor perikanan semakin signifikan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029.

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2030 disusun untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam

Renstra. IKU merupakan indikator terpilih yang menggambarkan keberhasilan utama penyelenggaraan urusan perikanan, sedangkan IKK adalah indikator yang mencerminkan pencapaian penyelenggaraan urusan melalui kegiatan/sub kegiatan yang lebih operasional.

Target capaian IKU dan IKK ditetapkan sejak tahun 2025 hingga tahun 2030 secara bertahap dan realistis. Penetapan target memperhatikan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pembangunan, serta kesinambungan program-program strategis daerah. Dengan adanya indikator ini, diharapkan proses monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan dapat dilakukan secara lebih sistematis, akuntabel, dan terukur.

Adapun IKU Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Keterangan
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Perikanan											
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Perikanan		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)	1.41	1.44	1.47	1.50	1.53	1.56	1.59	
		Meningkatnya Produktivitas Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.602	1.652	1.702	1.752	1.802	1.852	1.902	
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	
		Perlindungan Sumber Daya Perikanan dan Pengawasan Wilayah Tangkap	Kawasan Konservasi Daerah yang Operasional (Ha)	-	-	50	60	70	80	90	
		Meningkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (KG/KAP/TH)	41	42	43	44	45	46	47	
		Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi	Nilai SAKIP (Skor)	67,07	67,57	68,07	68,57	69,07	69,57	70,07	

capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat pada periode 2025–2030 diarahkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan perikanan secara komprehensif.

1. Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan.

Melalui kontribusi sector perikanan terhadap PDRB, dengan target kenaikan dari 1,44% pada tahun 2025 menjadi 1,56% pada tahun 2030.

2. Meningkatnya produksifitas pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil perikananProduksi Perikanan Budidaya.

o produksi perikanan tangkap ditetapkan meningkat secara bertahap dari 1.652 ton pada tahun 2025 menjadi 1.902 ton pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat kapasitas nelayan serta mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap secara berkelanjutan.

o Produksi perikanan budidaya diharapkan mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibanding perikanan tangkap, yaitu dari 2.800 ton pada tahun 2025 menjadi 3.800 ton pada tahun 2030. Peningkatan ini ditopang oleh pengembangan teknologi budidaya, penyediaan benih berkualitas, serta dukungan sarana prasarana yang memadai.

3. Perlindungan sumber daya perikanan dan pengawasan wilayah tangkap.

Indikator ini menggambarkan komitmen terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan. Target kawasan konservasi daerah yang operasional dimulai dari 50 hektar pada tahun 2026 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 90 hektar pada tahun 2030. Dengan demikian, kegiatan penangkapan dapat berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan.

4. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat.

Angkat konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Kutai Barat ditargetkan meningkat dari 42 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 47 kg/kapita/tahun pada tahun 2030. Indikator ini selaras dengan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperluas pasar hasil perikanan lokal.

5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Terukur melalui Nilai SAKIP perangkat daerah ditingkatkan dari skor 67,07 tahun 2025 menjadi 70,07 pada tahun 2030.

Secara umum, indikator kinerja utama yang ditetapkan memperlihatkan keseimbangan antara peningkatan produktivitas (perikanan tangkap dan budidaya), keberlanjutan ekologi (kawasan konservasi), ketersediaan pangan (peningkatan pasokan ikan), serta peningkatan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat (konsumsi ikan). Target yang dirancang bersifat progresif, realistis, dan sejalan dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan penjabaran teknis dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat. IKK disusun dengan memperhatikan capaian kinerja periode sebelumnya (baseline tahun 2024), arah kebijakan RPJMD 2025–2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat. Dengan demikian, IKK berfungsi sebagai instrumen pengendali sekaligus pengukur kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, sehingga kesinambungan pembangunan sektor perikanan dapat terjamin hingga tahun 2030. Tabel 4.5 menyajikan Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kutai Barat

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Rentra Dinas Perikanan Kutai Barat

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG HELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.	Angka Konsumsi Ikan	positif	Kg/KAPITA	41	42	43	44	45	46	47	
3.	Kawasan konservasi daerah yang operasional	positif	Ha	-	-	50	60	70	80	90	
4.	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	positif	Angka	67,17	67,57	68,07	68,57	69,07	69,57	70,17	
5.	Produksi Perikanan Budidaya	positif	Ton	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	
6.	Produksi Perikanan Tangkap	positif	Ton	1.602	1.652	1.702	1.752	1.802	1.852	1.902	

Berdasarkan tabel IKK yang telah disusun, terlihat bahwa Dinas Perikanan menargetkan peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap secara bertahap, sejalan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Upaya pemberdayaan kelompok nelayan, penguatan Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta pengembangan Pokmaswas diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan daya saing pelaku perikanan.

Selain itu, Peningkatan Kawasan Konservasi daerah yang Operasional dengan Pengawasan di perairan umum menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus mendukung angka konsumsi ikan per kapita yang terus meningkat setiap tahun. Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga menjadi indikator untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, target IKK tahun 2025–2030 dirancang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Dengan adanya baseline 2024, arah pencapaian kinerja menjadi lebih jelas dan dapat dipantau secara berkelanjutan sesuai prinsip *cascading planning*.

Dengan adanya IKK ini, setiap tahapan pembangunan sektor perikanan dapat diukur secara lebih detail dan terarah, sekaligus memperkuat keterkaitan antara tujuan strategis (IKU) dengan capaian nyata di lapangan.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029.

Renstra ini memuat arah pembangunan sektor perikanan yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja utama (IKU), serta indikator kinerja kunci (IKK). Seluruh substansi Renstra diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kutai Barat.

Penyusunan Renstra ini juga telah melalui proses analisis yang komprehensif, meliputi:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2021–2024), yang menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan perencanaan.
2. Analisis pelayanan, permasalahan, potensi, dan isu strategis, baik di tingkat global, nasional, regional, maupun lokal, yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.
3. Cascading tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang terintegrasi dengan NSPK dari pemerintah pusat, sasaran RPJMD, serta kewenangan perangkat daerah.
4. Penahapan pembangunan dari tahun 2025 hingga 2030, yang mengakomodasi keberlanjutan perencanaan serta kesinambungan penyelenggaraan urusan perikanan.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman perencanaan bagi internal Dinas Perikanan, tetapi juga sebagai instrumen

akuntabilitas publik, karena memuat indikator yang terukur (IKU dan IKK) untuk menilai kinerja penyelenggaraan urusan perikanan setiap tahunnya.

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat menyadari bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra ini tidak dapat dicapai secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan multipihak. Oleh karena itu, implementasi Renstra memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, masyarakat perikanan, pelaku usaha, akademisi, serta mitra pembangunan lainnya.

Pada akhirnya, Renstra ini diharapkan menjadi acuan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan dalam mewujudkan sektor perikanan yang produktif, berdaya saing, dan ramah lingkungan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat secara berkeadilan.